



**PEMERINTAH KOTA
DENPASAR**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP 2019**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas sung kertha wara nugraha-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar selama Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016–2021 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government* juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Denpasar, 31 Maret 2020

WALIKOTA DENPASAR



RAHMAWIJAYA MANTRA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT

Jalan Menuh Nomor 8 Telp. (0361) 234876 Fax. (0361) 227160 Denpasar

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Denpasar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Denpasar, 30 Maret 2020

Inspektur Kota Denpasar



Ida Bagus Gde Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
19640223 199203 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN SUDAH DI REVIU	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Kota Denpasar	2
B.1. Kondisi Geografis	2
B.2. Kondisi Demografis	6
B.3. Pertumbuhan Ekonomi	11
C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi.....	16
C.1. Kedudukan	16
C.2. Kewenangan dan Tugas Pokok.....	16
C.3. Struktur Organisasi.....	18
D. Aparatur Pemerintah	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis.....	21
B. Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019	35



B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019.....	40
C. Akuntabilitas Keuangan	128
D. Analisa Efisiensi	132
BAB IV PENUTUP	135
LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	3
Tabel 1.2	Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan (Hektar) Tahun 2018 – 2019	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2015-2019	7
Tabel 1.4	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2017 dan 2019	8
Tabel 1.5	Trend Indikator Kependudukan Kota Denpasar	9
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Kota Denpasar yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2018	11
Tabel 1.7	Laju dan Andil Inflasi Kota Denpasar Desember 2019	15
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar	24
Tabel 2.2	Tujuan/Sasaran dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019	27
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019	28
Tabel 2.4	Formula Perhitungan dan Sumber Data Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar	31
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2019	36
Tabel 3.2	Kategori Capaian Kinerja	39
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1	41
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2	46
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3	49

Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4	52
Tabel 3.7	Perbandingan TPT dan TPAK se-Bali Tahun 2018 dan 2019	53
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5	56
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6	66
Tabel 3.10	Tabel Capaian Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2019	67
Tabel 3.11	Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2017-2019	69
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7	71
Tabel 3.13	Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak Kota Denpasar Tahun 2017-2019	73
Tabel 3.14	Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar	75
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8	79
Tabel 3.16	Rincian Program Lingkungan Sehat Perumahan di Kota Denpasar Tahun 2019	80
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9	89
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10.....	95
Tabel 3.19	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11.....	101
Tabel 3.20	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12.....	103
Tabel 3.21	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13.....	106
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14.....	113
Tabel 3.23	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15.....	115
Tabel 3.24	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16.....	122
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Indeks LH Tahun 2019	126

Tabel 3.26	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019	128
Tabel 3.27	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Sreategis Tahun 2019	129
Tabel 3.28	Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar	131
Tabel 3.29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar	4
Gambar 1.2	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan usaha Tahun 2018	10
Gambar 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar 2014 - 2018 (Persen)	12
Gambar 1.4	Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Bulan Desember 2017 – Desember 2019 (persen)	14
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar	19
Gambar 3.1	Grafik Capaian Kinerja	39
Gambar 3.2	Potret Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2015-2019	50
Gambar 3.3	Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2019	50
Gambar 3.4	Perbandingan Angka Pengangguran Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2019	54
Gambar 3.5	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2019	56
Gambar 3.6	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Berdasarkan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2019	58
Gambar 3.7	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019	60
Gambar 3.8	Sistem e-Porkir	99
Gambar 3.9	Sistem <i>Logical Framework</i> dan <i>Cascading</i>	99
Gambar 3.10	Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar saat membuka Pelatihan Kewirausahaan	107

Gambar 3.11 Fasilitas dengan mengikutsertakan UMKM Kota Denpasar pada Pameran UMKM di Luar Daerah	109
Gambar 3.12 Pembinaan Usaha kepada salah satu Koperasi ..	110
Gambar 3.13 Pelaksanaan Monitoring Perkuatan Permodalan bagi Koperasi	111
Gambar 3.14 Kepala Dinas Koperasi saat melihat stand pameran koperasi yang ikut serta dalam rangkaian Pameran Harkopnas di Purwokerto	112
Gambar 3.15 Jumlah Investasi di Kota Denpasar Tahun 2015 – 2019	114
Gambar 3.16 Kegiatan Pameran Pariwisata Kota Denpasar	118
Gambar 3.17 Daya Tarik Wisata Budaya yang menjadi Primadona untuk Menarik Kunjungan Wisatawan ke Kota Denpasar	120
Gambar 3.18 Antusiasme Siswa-siswa Sekolah dalam Menabung Sampah di Bank Sampah	124
Gambar 3.19 <i>Launching</i> Aplikasi SiDarling oleh Ibu Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)	127

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Tahun 2019 merupakan Tahun Ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan, 16 Sasaran dan 29 Indikator Sasaran. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi 1. terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target), dan 1 indikator sasaran nilainya belum keluar.
- Misi 2. terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 12 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 10 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).

- Misi 3. terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran kategori baik (mencapai target) dan 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).
- Misi 4. terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 9 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 3 indikator sasaran kategori baik (mencapai target) serta 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).
- Misi 5. terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target) dan 1 indikator sasaran kategori baik (mencapai target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 29 indikator sasaran, diketahui bahwa 18 (delapan belas) indikator sasaran atau 62,07% kategori Baik Sekali dan melampaui target, 10 indikator sasaran atau 34,48% kategori Baik, dan 1 indikator sasaran atau 3,45% realisasi nilai capaian kinerja belum dirilis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 115,80% atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 Sangat Baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir. Bertitik tolak dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta hasil Reviu Sasaran dan Indikator RPJMD

Kota Denpasar, maka penyusunan LKjIP Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian, LKjIP Kota Denpasar Tahun 2019 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2019 merupakan Tahun Ketiga RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

B. Kondisi Kota Denpasar

B.1. Kondisi Geografis

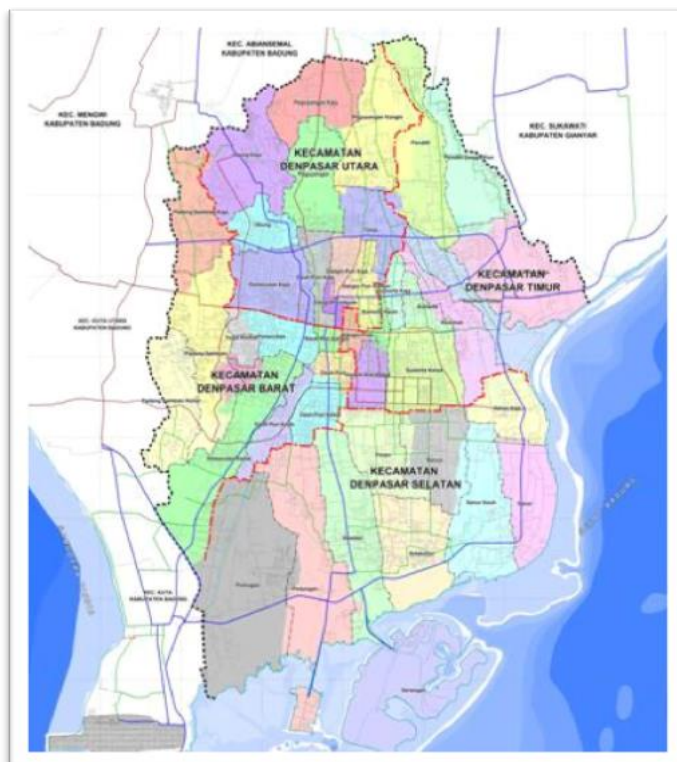
Kota Denpasar memiliki luas wilayah 12.778 Ha (2,27 persen dari luas wilayah Provinsi Bali). Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km² (24,59 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km² (18,83 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,31 km² (17,46 persen). Selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan
di Kota Denpasar

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Denpasar Utara		3142	24.59
	1.1	Kelurahan Dangin Puri Kaja	142	4.52
	1.2	Desa Dangin Puri Kangin	75	2.39
	1.3	Kelurahan Tonja	230	7.32
	1.4	Desa Dangin Puri Kauh	72	2.29
	1.5	Desa Pemecutan Kaja	385	12.25
	1.6	Desa Ubung	103	3.28
	1.7	Desa Ubung Kaja	430	13.69
	1.8	Desa Dauh Puri Kaja	109	3.47
	1.9	Kelurahan Peguyangan	644	20.50
	1.10	Desa Peguyangan Kaja	536	17.06
	1.11	Desa Peguyangan Kangin	416	13.24
2	Kecamatan Denpasar Barat		2406	18.83
	2.1	Desa Padang Sambian Klod	412	17.12
	2.2	Desa Pemecutan Klod	442	18.37
	2.3	Desa Kauh Puri Kauh	183	7.61
	2.4	Desa Kauh Puri Klod	188	7.81
	2.5	Kelurahan Dauh Puri	60	2.49
	2.6	Desa Dauh Puri Kangin	59	2.45
	2.7	Kelurahan Pemecutan	186	7.73
	2.8	Desa Tegal Harum	62	2.58
	2.9	Desa Tegal Kertha	35	1.45
	2.1	Kelurahan Padang Sambian	370	15.38
	2.11	Desa Padang Sambian Kaja	409	17.00
3	Kecamatan Denpasar Timur		2231	17.46
	3.1	Desa Dangin Puri Klod	209	9.37
	3.2	Desa Sumerta Klod	268	12.01
	3.3	Kelurahan Kesiman	239	10.71
	3.4	Desa Kesiman Petilan	281	12.60
	3.5	Desa Kesiman Kertalangu	380	17.03
	3.6	Kelurahan Sumerta	50	2.24
	3.7	Desa Sumerta Kaja	52	2.33
	3.8	Desa Sumerta Kauh	87	3.90

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
3.9	Kelurahahn Daging Puri	62	2.78
3.1	Kelurahan Penatih	291	13.04
3.11	Desa Penatih Daging Puri	312	13.98
4	Kecamatan Denpasar Selatan	4999	39.12
4.1	Desa Pemogan	971	19.42
4.2	Kelurahan Pedungan	749	14.98
4.3	Kelurahan Seseetan	739	14.78
4.4	Kelurahan Serangan	481	9.62
4.5	Desa Sidakarya	389	7.78
4.6	Kelurahan Panjer	359	7.18
4.7	Kelurahan Renon	254	5.08
4.8	Desa Sanur Kauh	386	7.72
4.9	Kelurahan Sanur	402	8.04
3.1	Desa Sanur Kaja	269	5.38
	Kota Denpasar	12.778	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2019



Gambar 1.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar

Berdasarkan Peta Wilayah Kota Denpasar, dapat diketahui batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah Utara, Barat dan Selatan sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung).
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung).

Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah, sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran dan lainnya. Lahan Pertanian di Kota Denpasar merupakan lahan sawah irigasi. Luas lahan pertanian selama 2 Tahun (2018-2019) berkurang seluas 212 Ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman dan jalan serta lainnya. Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar Tahun 2018-2019 disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan (Hektar) Tahun 2018-2019

Penggunaan Lahan		2017 (Ha)	2018 (Ha)	2019 (Ha)
1	Lahan Pertanian	2.919	2.680	2.468
	Lahan Sawah Irigasi	2.409	2.170	1.958
	Lahan Pertanian Bukan Sawah	510	510	510
	- Tegalan	390	390	390
	- Perkebunan	35	35	35
	- Hutan Rakyat	75	75	75
	- Lainnya	10	10	10

Penggunaan Lahan		2017 (Ha)	2018 (Ha)	2019 (Ha)
2	Lahan bukan Pertanian (Pekarangan, jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll)	9.859	10.098	10.310
Jumlah		12.778	12.778	12.778

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2019

B.2. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat penduduk suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin tinggi tingkat kepadatan, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada Tahun 2019 mencapai 947.100 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 483.700 jiwa (51,07%) dan jumlah penduduk perempuan 463.400 jiwa (48,93%). Dengan tingkat kepadatan penduduk Denpasar di Tahun 2019 mencapai 7.412 jiwa per Km². Angka ini sangat jauh diatas tingkat kepadatan Provinsi Bali yang hanya sebesar 753 jiwa per Km². Dari empat kecamatan di Kota Denpasar, kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Denpasar Barat (11.373 jiwa per km²). Angka ini hampir mencapai 1,6 kali lipat kepadatan Kota Denpasar. Sementara itu Kecamatan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Denpasar Utara dengan kepadatan penduduk hanya sebesar 6.618 jiwa per Km². Padatnya penduduk di Kecamatan Denpasar Barat erat kaitannya dengan fungsi sentral dari

Kota Denpasar, disamping sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat pendidikan maupun kesehatan. Sementara Kecamatan Denpasar Selatan merupakan wilayah yang dianggap sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*) khususnya pada industri pariwisata.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk, Kepadatan penduduk dan
Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar, 2015-2019

Uraian	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
2015	880.600	6.891
2016	897.300	7.022
2017	914.300	7.155
2018	930.600	7.283
2019	947.100	7.412

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2019

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan dengan jumlah penduduk 305.380 jiwa. Penduduk dengan jumlah terendah Kecamatan Denpasar Timur yaitu berjumlah 160.150 jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 81.410 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 78.740 jiwa.

Ditinjau dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan di Denpasar relatif berimbang. Dominasi jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan terlihat pada seluruh kecamatan yang ada di Denpasar. Pada Tahun 2017, 2018 dan proyeksi di Tahun 2019, rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Denpasar Timur tercatat yang terendah dengan *sex ratio* pada kisaran 103. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat yang memiliki rasio jenis kelamin terbesar 104. Sementara Kecamatan Denpasar

Utara memiliki rasio jenis kelamin tertinggi sebesar 105. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk di masing-masing kecamatan yang ada di Denpasar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, dengan perbandingan sekitar 103-105 orang laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Secara rinci Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2017-2019 (ribu jiwa)

Kecamatan	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Denpasar Selatan	149.510	152.770	156.080	143.160	146.280	149.300	292.670	299.050	305.380
Denpasar Timur	79.140	80.240	81.410	76.620	77.650	78.740	155.760	157.890	160.150
Denpasar Barat	135.090	137.450	139.830	129.400	131.580	133.810	264.490	269.030	273.640
Denpasar Utara	102.960	104.640	106.380	98.420	99.990	101.550	201.380	204.630	207.930
Kota Denpasar	466.700	475.100	483.700	447.600	455.500	463.400	914.300	930.600	947.100

Sumber : BPS Kota Denpasar; Proyeksi Penduduk Denpasar, 2017-2019

Ditinjau menurut kelompok umur, persentase penduduk usia produktif (15-64 Tahun) masih tergolong ideal yaitu mencapai 73,35% dengan rasio beban tanggungan sebesar 36,33%. Artinya setiap 100 orang penduduk Kota Denpasar usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 36 orang penduduk yang tidak/belum produktif.

Tabel 1.5
Trend Indikator Kependudukan Kota Denpasar

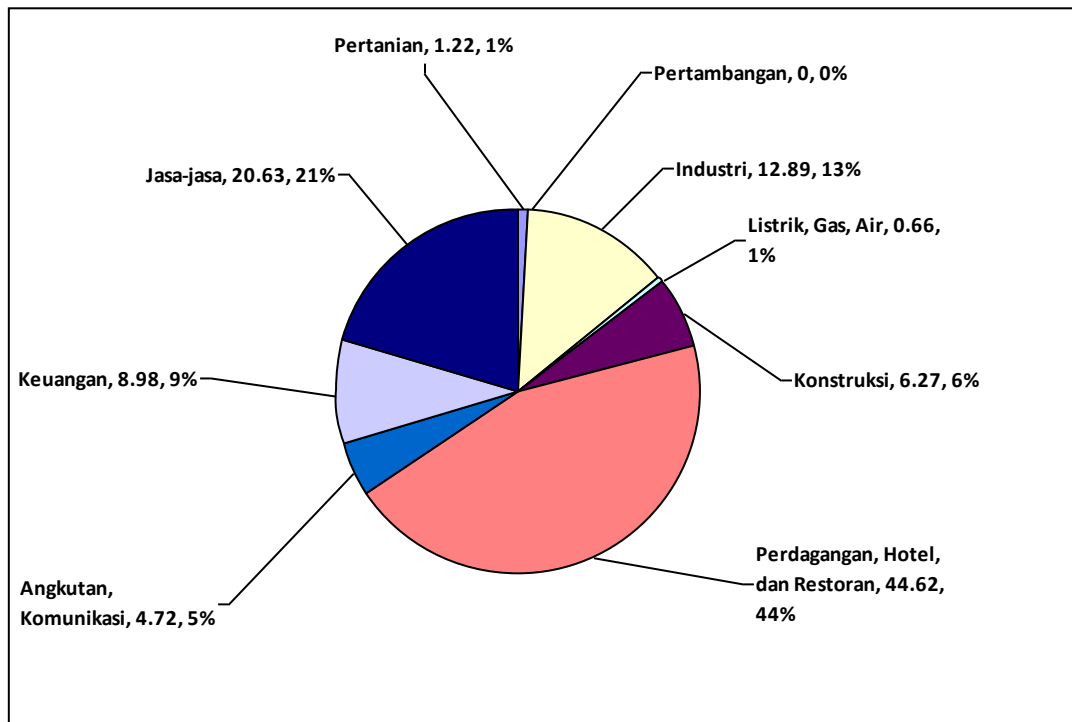
Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk	897,300	914,300	930,600
Pertumbuhan Penduduk	1.90	1.89	1.78
Kepadatan Pnduduk (jiwa/km2)	7,022	7,155	7,283
ratio jenis kelamin (%)	104	104	104
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur			
0-14 Tahun	24,16	23,88	23,58
15-64 Tahun	72,86	73,12	73,35
>65 Tahun	2,98	3,01	3,07
Rasio Beban Tanggungan (%)	37,24	36,77	36,33

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2019

Penduduk Kota Denpasar sebagian besar bermata pencaharian pada lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yaitu sejumlah 230.541 jiwa atau 44,62% dari Jumlah Penduduk yang bekerja di Kota Denpasar Tahun 2018. Sektor yang banyak menyerap tenaga terbesar kedua adalah sektor jasa-jasa yang meliputi jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Dalam sektor ini ada 106.600 tenaga kerja pada Tahun 2018 atau sekitar 20,63 persen tenaga kerja yang diserap dalam sektor ini. Untuk sektor pertambangan, tidak ada penyerapan tenaga kerja karena Kota Denpasar tidak memiliki daerah pertambangan maupun penggalian. Dan dalam sektor pertanian pada Tahun 2018 hanya 1,22 persen tenaga kerja yang terserap didalamnya, hal ini dikarenakan lahan pertanian Kota Denpasar semakin berkurang.

Secara terperinci dapat dilihat pada jumlah penduduk Kota Denpasar yang berusia 15 Tahun keatas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha, diuraikan dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut
Lapangan Usaha Tahun 2018



Jika dilihat berdasarkan gender, sektor perdagangan, restoran dan jasa akomodasi menyerap pekerja terbesar baik laki-laki maupun perempuan pada Tahun 2018 yaitu sebesar 31.002 laki-laki dan 1.398 perempuan. Hal ini dikarenakan baik laki-laki maupun perempuan punya kapasitas yang sama untuk bekerja pada sektor ini. Berbeda halnya dengan proporsi gender yang bekerja pada sektor konstruksi yaitu sebesar 31.002 laki-laki dan 1.398 perempuan. Hal ini cukup wajar mengingat jenis pekerjaan pada sektor konstruksi merupakan pekerjaan lapangan yang membutuhkan tenaga fisik. Begitu pula pada sektor pertanian, perbedaan gender dalam penyerapan tenaga kerja cukup tinggi yaitu

lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki dibandingkan perempuan.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kota Denpasar yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

No	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pertanian	5.089	1.189	6.278
2	Pertambangan dan Penggalan	0	0	0
3	Industri	25.340	41.266	66.606
4	Listrik, Gas dan Air	3.087	343	3.430
5	Konstruksi	31.002	1.398	32.400
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	130.718	99.823	230.541
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	21.720	2.647	24.367
8	Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan	30.186	16.234	46.420
9	Jasa Kemasyarakatan Sosial, dan Perseorangan	48.277	58.323	106.600
	Jumlah	295.419	220.035	516.642

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar, 2018

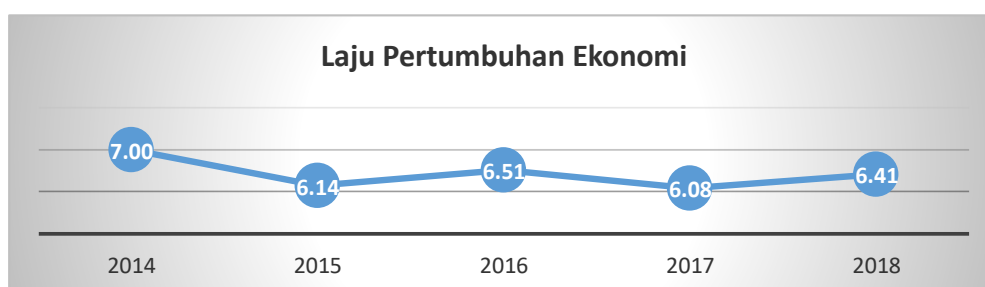
B.3. Pertumbuhan Ekonomi

Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa disuatu daerah atau wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan perekonomian yang tercipta di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan. Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Pada 5 (lima) Tahun terakhir yaitu dari Tahun 2014 hingga Tahun 2018, sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada Tahun 2017 sebesar 6,06 persen lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali yang hanya sebesar 5,57 persen. Pertumbuhan ekonomi Denpasar pada Tahun 2014 tumbuh sebesar 7 persen dan pada Tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 6,14 persen. Meski pada Tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 6,14 persen, pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Denpasar mengalami percepatan kembali menjadi sebesar 6,51 persen. Pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar kembali mengalami perlambatan menjadi sebesar 6,08 persen. Dan terakhir pada Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Denpasar kembali mengalami percepatan menjadi 6,41 persen.

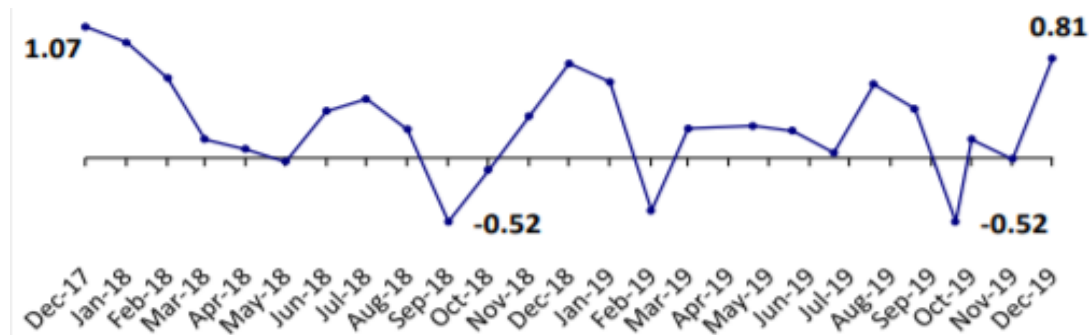
Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar
Tahun 2014-2018 (Persen)



Inflasi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu). Atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dilihat dari penyebabnya inflasi bisa terjadi karena dorongan permintaan (*demand pull inflation*) maupun dorongan kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*). Inflasi akibat dorongan permintaan terjadi, ketika permintaan akan barang dan jasa sangat tinggi, sehingga meningkatkan harga barang dan jasa tersebut. Sementara inflasi akibat dorongan biaya produksi terjadi ketika biaya produksi (input) mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut meningkat.

Pada bulan Desember 2019 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 0,81% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK 2012=100) sebesar 134,62 Tingkat inflasi Tahun kalender Desember 2019 tercatat setinggi 2,37% sama dengan tingkat inflasi Tahun ke Tahun (Desember 2019 terhadap Desember 2018). Secara umum harga-harga di Kota Denpasar mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Apabila diamati pergerakannya dari Desember 2017, maka tingkat inflasi di Kota Denpasar cenderung berfluktuasi. Inflasi tertinggi tercatat pada bulan Desember 2017 sebesar 1,07%, sedangkan deflasi terdalam pada September 2018 dan September 2019 dengan nilai yang sama yaitu -0,52%. Perkembangan inflasi Kota Denpasar Bulan Desember 2017 – Desember 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4
Perkembangan Inflasi Kota Denpasar
Bulan Desember 2017 – Desember 2019 (persen)



Sumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Bali, 2020

Enam kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi bulanan (*m to m*) yaitu kelompok II (makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau) setinggi 2,21%; Kelompok I (bahan makanan) setinggi 1,36%; Kelompok V (kesehatan) setinggi 0,88%; Kelompok VII (pendidikan, rekreasi, dan olahraga) setinggi 0,14%; dan Kelompok III (perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar) setinggi 0,09%.

Komoditas yang tercatat mengalami kenaikan harga atau memberikan sumbangan inflasi pada bulan Desember 2019 antara lain nasi dengan lauk, tarif angkutan udara, bawang merah, jeruk, mie, sate, minyak goreng, daging ayam ras dan rokok. Sementara itu, komoditas yang tercatat mengalami laju inflasi antara lain emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit, salak, apel, jagung manis, anggur, baju kaos berkerah, daun singkong dan pengharum/pelembut pakaian.

Inflasi pada bulan Desember 2019 tercatat disumbangkan oleh Kelompok II (makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) dengan andil inflasi sebesar 0,3777%; Kelompok I (bahan makanan) dengan andil inflasi sebesar 0,2673%; Kelompok VII (transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan) dengan andil inflasi sebesar 0,0986%; Kelompok V (kesehatan) dengan andil inflasi sebesar

0,0514%; Kelompok III (perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar) dengan andil inflasi sebesar 0,0215% dan Kelompok VI (pendidikan, rekreasi, dan olahraga) dengan andil inflasi sebesar 0,0127%. Sementara itu, satu kelompok pengeluaran menahan laju inflasi yaitu Kelompok IV (sandang) dengan andil deflasi sebesar -0,0225%. Laju dan andil inflasi Kota Denpasar Desember 2019 Menurut Kelompok Pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Laju dan Andil Inflasi Kota Denpasar Desember 2019
Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2018	IHK Desember 2019	Laju Inflasi Desember 2019*)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2019 **)	Laju Inflasi Tahun ke Tahun ***)	Andil Inflasi
Bahan makanan	146,16	147,27	1,36	0,76	0,76	0,2673
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	139,93	148,30	2,21	5,98	5,98	0,3777
Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar	124,60	126,27	0,09	1,34	1,34	0,0215
Sandang	115,12	117,68	-0,45	2,22	2,22	-0,0225
Kesehatan	128,48	132,54	0,88	3,16	3,16	0,0514
Pendidikan, rekreasi & olahraga	126,76	132,54	0,14	6,67	6,67	0,0127
Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	128,38	128,40	0,55	0,02	0,02	0,0986
Umum	131,50	134,62	0,81	2,37	2,37	0,8067

Sumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Bali, Januari, 2020

Keterangan :

- *) Persentase perubahan IHK Desember 2019 terhadap IHK bulan sebelumnya
- **) Persentase perubahan IHK Desember 2019 terhadap IHK bulan Desember 2018
- ***) Persentase perubahan IHK Desember 2019 terhadap IHK bulan Desember 2018

C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi

C.1. Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Denpasar dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu :

a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Denpasar dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

b. Aspek Administrasi/Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

C.2. Kewenangan dan Tugas Pokok

Kota Denpasar sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan

pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 9 (sembilan) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.

Di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, rincian urusan tersebut, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Denpasar, dengan urusan wajib yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1). Pendidikan;
- 2). Kesehatan;
- 3). Lingkungan Hidup;
- 4). Pekerjaan Umum;
- 5). Penataan Ruang;
- 6). Perencanaan Pembangunan;
- 7). Perumahan;
- 8). Kepemudaan dan Olah Raga;
- 9). Penanaman Modal;
- 10). Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 11). Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 12). Ketenagakerjaan;
- 13). Ketahanan Pangan;
- 14). Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 15). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 16). Perhubungan;
- 17). Komunikasi dan Informatika;
- 18). Pertanian;
- 19). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20). Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

- 21). Pemberdayaan Masyarakat;
- 22). Sosial;
- 23). Kebudayaan;
- 24). Statistik;
- 25). Kearsipan; dan
- 26). Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan terdiri dari :

- 1). Kelautan dan Perikanan;
- 2). Pertanian;
- 3). Kehutanan;
- 4). Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5). Pariwisata;
- 6). Industri;
- 7). Perdagangan; dan
- 8). Ketransmigrasian;
- 9). Pasedahan Agung.

Tugas Pokok

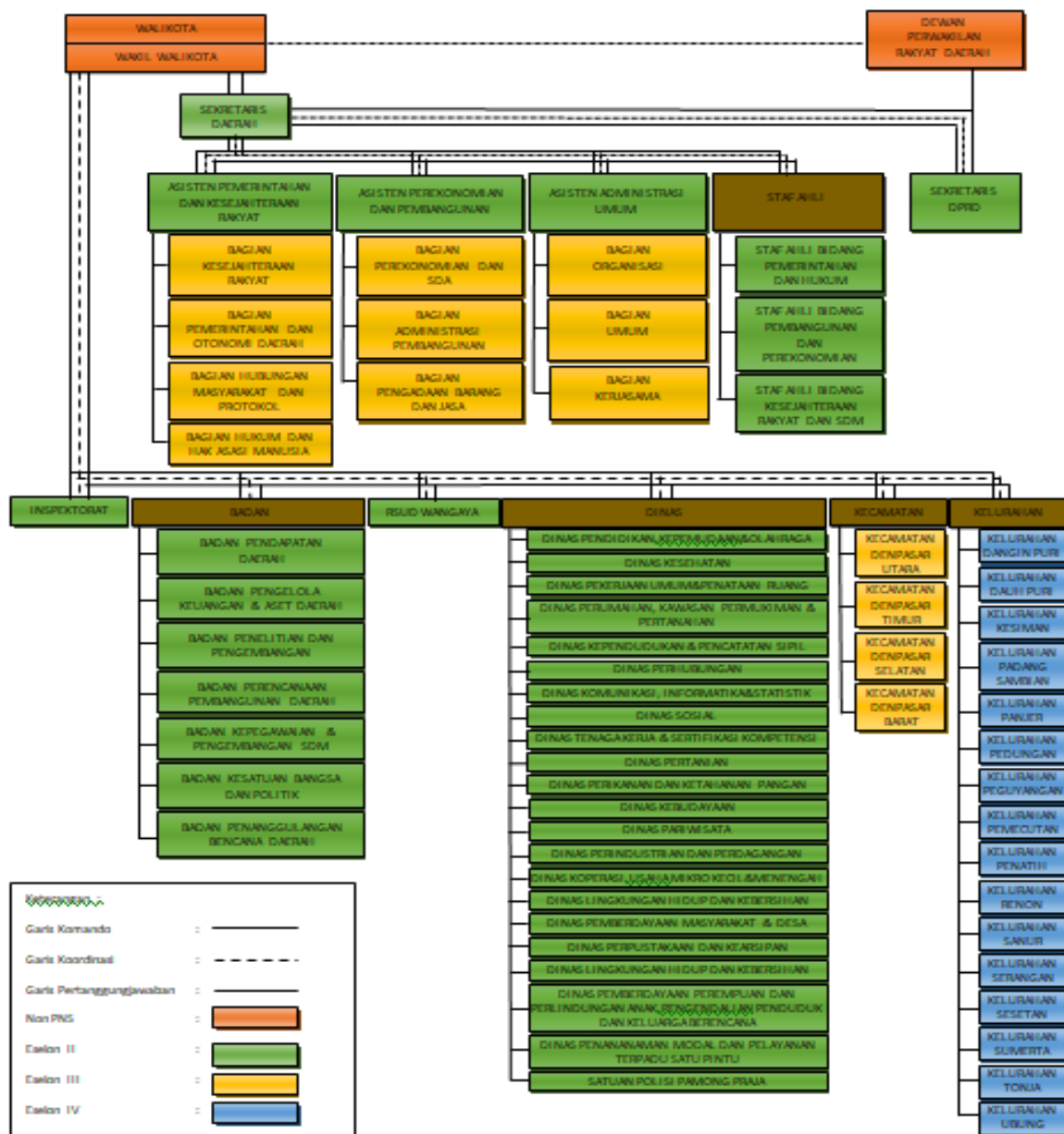
Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan.

C.3. Struktur Organisasi

Kota Denpasar sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Maka struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar dapat disajikan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar



D. Aparatur Pemerintah

Kedudukan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat per Desember Tahun 2019 sejumlah 5.624 orang, terdiri dari :

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan :

Golongan I	: 130 orang
Golongan II	: 1.077 orang
Golongan III	: 2.592 orang
Golongan IV	: 1.825 orang

- b. Jabatan Struktural yang terdiri dari :

Esselon II	: 35 orang
Esselon III	: 163 orang
Esselon IV	: 572 orang
Esselon V	: - orang

- c. Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 4.854 orang, terdiri atas :
 - 1) Fungsional guru sebanyak 2.139 orang
 - 2) Fungsional Medis dan Paramedis sebanyak 625 orang
 - 3) JFT Lainnya 164 orang
 - 4) Pelaksana sebanyak 1.926 orang

- d. Tingkat Pendidikan :

SD	: 106 orang
SMP	: 136 orang
SLTA	: 1.186 orang
D1	: 32 orang
D2	: 260 orang
D3	: 424 orang
S1/D4	: 3.002 orang
S2	: 475 orang
S3	: 3 orang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, menjabarkan Visi dan Misi, Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. RPJMD berupaya menyelesaikan isu-isu dan permasalahan yang terjadi di daerah melalui strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar kreatif adalah "Denpasar Kota Hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan.

Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016- 2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”**. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

2. Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan visi dan misi Kota Denpasar 2016-2021 ditetapkan 5 (lima) tujuan, 16 Sasaran dan 29 Indikator yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	
1	2	3		4	
1	Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)
				2	Indeks Tri Hita Karana
		2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan
		4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran (%)
		5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (Tahun)
		6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan
		7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG
				9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG
				10	Katagori Kota Layak Anak
		8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh (%)

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
		9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik (%)
				13	Titik Genangan (%)
				14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)
				15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat
				17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)
				18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori)
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)
				20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)
		12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%)
		13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
			23 Koperasi yang SHU-nya meningkat (%)
		14 Meningkatnya nilai investasi	24 Investasi yg tercatat di PTSP
		15 Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)
			26 Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik
			27 Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)
5	Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	16 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28 Sampah tereduksi (%)
			29 Indeks LH

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan Tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar 2016-2021, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 702.605.085.228,73 (28,25 persen) dari total Belanja pada APBD Kota Denpasar TA 2019 / sebesar Rp. 2.487.294.595.541,49. Secara detail anggaran kinerja Pemerintah Kota Denpasar untuk masing-masing Tujuan/Sasaran disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tujuan/Sasaran dan Anggaran Kinerja
Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Menguatnya jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	41.393.857.336,31
2	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	506.785.184.166,42
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>low enforcement</i>)	21.076.713.829,00

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (<i>Welfare Society</i>) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	62.559.688.946,00
5	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	53.420.727.536,00

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2019

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 ditampilkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
1		2		3	4
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	2.351
		2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80.01
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2.07%
4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran	Persen	3,35%
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,39
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Indeks	12.7

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
1		2		3	4
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Persen	78,50%
		9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Persen	60%
		10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh	Persen	20%
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik	Persen	64.78%
		13	Titik Genangan	Persen	30%
		14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	Persen	44,90%
		15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	47.84%
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82.00
		17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP
		18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	A
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3,5%
		20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6.4%
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
1		2		3	4
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50%
		23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	66%
14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	2.5
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	605.066
		26	Lama Tinggal Wisatawan		
		- Asing		Hari	3.14
		- Domestik		Hari	3,11
		27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Juta rupiah	291.899,08
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi	Persen	26
		29	Indeks LH	Indeks	53.63

Dalam rangka memudahkan pengukuran pencapaian ke-29 (dua puluh sembilan) IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, maka disusun formula perhitungan IKU dan sumber data, seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Formula Perhitungan dan Sumber Data
Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Denpasar

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	Data Hasil Pemetaan/Survey	Hasil pemetaan/survey Dinas Pertanian
2	Indeks Tri Hita Karana	Data Hasil Pemetaan/Survey	Hasil penghitungan/survey Dinas Kebudayaan
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N / A	Hasil penghitungan/survey Dinas Kebudayaan
4	Angka Kemiskinan (%)	$\frac{\text{Banyaknya Orang Miskin}}{\text{Total Penduduk Denpasar}} \times 100\%$	Hasil penghitungan/survey Badan Pusat Statistik
5	Angka Pengangguran (%)	$\frac{\text{Banyaknya Pengangguran}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$	Hasil penghitungan/survey Badan Pusat Statistik
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Hasil penghitungan/survey Badan Pusat Statistik
7	Indeks Pendidikan	$\frac{I \text{ Harapan Lama Sekolah} + I \text{ Rata-rata Lama Sekolah}}{2}$	Hasil penghitungan/survey Badan Pusat Statistik
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}} \times 100\%$	Hasil penghitungan/survey Badan Pusat Statistik
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari keterwakilan perempuan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	Hasil penghitungan/survey Badan Pusat Statistik
10	Katagori Kota Layak Anak	Hasil Penilaian dari Pemerintah Pusat	Hasil Penilaian dari Pemerintah Pusat

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
11	Luas permukiman kumuh (%).	$\frac{\text{Luasan Permukiman Kumuh}}{\text{Kondisi awal RPJMD (184.406 ha)}} \times 100\%$	Hasil pemetaan/survey Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
12	Jalan Kondisi Baik (%).	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Jalan (486.084,35 m)}} \times 100\%$	Hasil pemetaan/survey Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Titik Genangan (%)	$\frac{\text{Jumlah Titik Genangan Tahun N}}{\text{Titik Genangan Kondisi Awal RPJMD (8 titik)}} \times 100\%$	Hasil pemetaan/survey Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	$\frac{\text{Rumah Tangga Terakses Sistem Jaringan Sanitasi}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100\%$	Hasil pemetaan/survey Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	$\frac{\text{Masyarakat Terlayani Air Bersih}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$	Hasil pemetaan/survey Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total SKM PD/UPP}}{\text{Total PD/UPP}} \times 100\%$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)	Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan
18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori)	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	$\frac{\text{Hasil penghitungan BPS - Hasil penghitungan BPS Tahun sebelumnya}}{\text{Hasil penghitungan BPS Tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Hasil penghitungan/survey Badan Pusat Statistik

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	$\frac{\text{Hasil penghitungan BPS Tahun N} - \text{Hasil penghitungan BPS Tahun sebelumnya}}{\text{Hasil penghitungan BPS Tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Hasil penghitungan/ survey Badan Pusat Statistik
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).	$\frac{\text{Jumlah LPD Sehat}}{\text{Total LPD di Kota Denpasar}} \times 100\%$	Hasil Penilaian Bagian Perekonomian
22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).	$\frac{\text{Jml peningkatan Tahun N} + \text{Jml Peningkatan Tahun Sebelumnya}}{\text{Target Kondisi Akhir RPJMD (750 Unit UM yang meningkat)}} \times 100\%$	Hasil penilaian Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
23	Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).	$\frac{\text{Jml Koperasi Yang SHUnya Meningkat}}{\text{Jml Koperasi Kondisi Awal RPJMD (1.049)}} \times 100\%$	Hasil penilaian Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
24	Investasi yg tercatat di PTSP	$\frac{\text{Jumlah Investasi Tahun N}}{\text{Jumlah Investasi N-1}} \times 100\%$	Hasil penghitungan Investasi melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Total wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar selama satu tahun	Hasil penghitungan Dinas Pariwisata
26	Lama Tinggal Wisatawan	$\frac{\text{Banyaknya Malam Tamu}}{\text{Tamu Yang Datang \& Menginap}}$	Hasil penghitungan Dinas Pariwisata
	- Asing	$\frac{\text{Banyaknya Malam Tamu Asing}}{\text{Tamu Asing Yang Datang \& Menginap}}$	Hasil penghitungan Dinas Pariwisata
	- Domestik	$\frac{\text{Banyaknya Malam Tamu Domestik}}{\text{Tamu Domestik Yang Datang \& Menginap}}$	Hasil penghitungan Dinas Pariwisata
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	Penerimaan Pajak Hotel + Pajak Restoran + Pajak Hiburan	Hasil penghitungan Badan Pendapatan Kota Denpasar
28	Sampah tereduksi (%)	$\frac{\text{Volume Sampah Yang Didaur Ulang}}{\text{Jumlah Volume sampah kota}} \times 100\%$	Hasil penghitungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
29	Indeks LH	$\frac{\text{Indeks Kualitas Air} + \text{Indeks Kualitas Udara} + \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan}}{3}$	Hasil penghitungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai 16 (enam belas) sasaran. Dari 29 (dua puluh sembilan) IKU terdapat 1 (satu) indikator yang N/A (*Not Available*) atau tidak dapat diukur, yaitu Indeks Kebudayaan. Sampai dengan Tahun 2019 belum pernah dilaksanakan pengukuran terhadap indeks kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2019, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan hanya mempublikasikan Indeks Kebudayaan untuk tingkat Provinsi di Indonesia, dimana Provinsi Bali (65,39) berada dibawah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (73,79) (<https://www.kemendikbud.go.id>).

Formula penghitungan terhadap IKU Kota Denpasar sebagian merupakan formula yang dirancang tersendiri sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar. Sebagian IKU mengadopsi formula pengukuran yang sudah dilaksanakan secara nasional, baik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun kementrian. Selain itu, sumber data untuk mendapatkan capaian juga berasal dari capaian yang memang hasil penghitungan dari perangkat daerah teknis maupun yang terpublikasi secara resmi dari BPS dan Kementerian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*public value*). Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2019 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat

capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar sebesar 115,80% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 1 : MENGUATNYA KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA TRADISIONAL								
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	2.170	2.351	1.958	83,28	2.289	85,54
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	96	80,01	95,5	119,36	80,21	119,06
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :					101,32		
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA								
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :					N/A		
SASARAN 3 : MENGENTASKAN KEMISKINAN								
4	Angka Kemiskinan	Persen	2,24	2,07	2,1	98,55	2,00	95,00
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :					98,55		
SASARAN 4 : MENGURANGI PEGANGGURAN								
5	Angka Pengangguran	Persen	1,82	3,35	2,22	133,73	3,25	131,69
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :					133,73		
SASARAN 5 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT								
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,27	73,39	74,68	101,76	74,63	100,07
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5 :					101,76		
SASARAN 6 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT								
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12,57	12,57	12,96	103,10	12,96	100,00
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6 :					103,10		
SASARAN 7 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK								
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	96,88	78,50	96,89	123,43	80,00	121,11
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks	58,80	60,00	58,25	97,08	60,00	97,08

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Utama	120,00	Nindya	120,00
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7 :					113,50		
SASARAN 8 : MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN								
11	Luas permukiman kumuh	Persen	40,06	20,00	23,08	115,39	100,00	23,08
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :					115,39		
SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR								
12	Jalan Kondisi Baik	Meter	377.165,00	314.885,44	385.188,90	122,33	334.878,68	115,02
		Persen	77,59	64,78	79,52	122,75		
13	Titik Genangan	Titik	6	6	4	150,00	4	100,00
			25,00	30,00	50,00	166,67		
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	84.293	80.502	86.250	107,14	81.044	106,42
			45,29	44,96	46,80	104,09		
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Orang	502.989	427.794	517.691	121,01	474.300	109,15
			54,05%	47,84%	54,98%	114,92		
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9 :					127,11		
SASARAN 10 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL								
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,62	82	86,48	105,46	84	102,95
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	A	BB	90,01	AA	80,01
			70,07	80,01	72,02		90,01	
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :					98,49		
SASARAN 11 : BERKEMBANGNYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN								
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	8,35	3,50	8,34	238,29		
		Milyar Rupiah	3.192	2.288	3.459		2.467	140,17
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	9,69	6,40	10,03	156,72		
		Milyar Rupiah	4.377	3.515	5.283		4.001	132,03

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :					197,50		
SASARAN 12 : MENINGKATNYA KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA								
21	Lembaga Perkreditasi Desa Sehat	Persen	97,14	100,00	85,71	85,71	100,00	85,71
			34	35	30		35	
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :					85,71		
SASARAN 13 : MENINGKATNYA PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL								
22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50	0,50	0,50	100,00		60,00
		Jml UM	300	450	450		750	
23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	63,00	66,00	66,00	100,00		87,93
		Koperasi	661	692	692		787	
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :					100,00		
SASARAN 14 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI								
24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	4.659	5.174	7.617	147,23	5.435	140,13
		Rupiah (Dalam Milyar)	-27,79	2,50	63,49	2539,60		
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :					147,23		
SASARAN 15 : MENINGKATKAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA								
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	594.539	605.066	709.536	117,27	667.086	106,36
26	Lama Tinggal Wisatawan							
	- Asing	Hari	3,13	3,14	3,14	100,00	3,16	99,37
	- Domestik	Hari	3,10	3,11	3,11	100,00	3,13	99,36
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Rupiah (Dalam Jutaan)	327.251,39	291.899,08	382.841,74	131,16	305.329,39	125,39
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :					112,11		
SASARAN 16 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
28	Sampah tereduksi	Persen	22,32	26,00	26,00	100,00	30,00	86,67
29	Indeks LH	Indeks	51,22	53,63	55,24	103,00	55,24	100,00
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :					101,50		

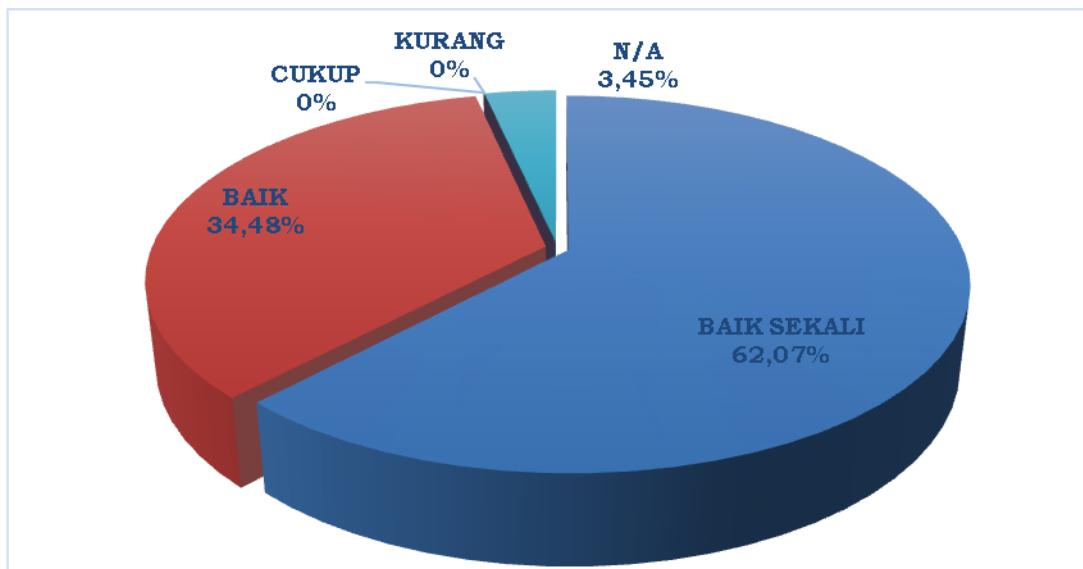
Sumber : Bappeda dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar

Skala penilaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 menggunakan skala seperti Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal seperti diatas.



Gambar 3.1
Grafik Capaian Kinerja

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, sebanyak 18 (delapan belas) IKU dinyatakan “Baik Sekali”, 10 (sepuluh) IKU dinyatakan “Baik”, dan 1 (satu) IKU belum ada nilai (N/A). Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2019 termasuk dalam kategori “Baik Sekali” dengan capaian 115,80%.

B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut.

Tujuan 1. Menguatnya Jati diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali

Untuk mewujudkan Tujuan Menguatkan Jati diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali, pada Tahun 2019 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional.
- b. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya.

Sebagaimana Visi Kota Denpasar “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan” yang telah ditetapkan, Denpasar harmonis dapat terwujud apabila masyarakat Kota Denpasar memegang teguh budaya dalam melaksanakan perkehidupannya. Budaya merupakan kekuatan Kota Denpasar, kekuatan ini sebagai faktor pembeda yang akan meningkatkan daya saing Kota Denpasar di tatanan global. Berkaitan

dengan hal tersebut, budaya sebagai jatidiri masyarakat Kota Denpasar berupaya terus dimantapkan keberadaannya sehingga di era global ini budaya di Kota Denpasar tetap eksis keberadaannya dan bahkan berkembang tanpa tercabut dari akarnya. Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional

Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 1 : MENGUATNYA KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA TRADISIONAL						
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	2.170	2.351	1.958	83,28
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	96	80,01	95,5	119,36
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :					101,32

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional yang terdiri dari 2 indikator sasaran, yaitu Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan dan Indeks Tri Hita Karana. Indikator sasaran Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan hanya sebesar 1.958 Ha dan indikator sasaran

Indeks Tri Hita Karana sebesar 95.50 Rata-rata capaian kinerja sebesar 101,32% (Baik sekali).

Subak merupakan lembaga tradisional yang bergerak di bidang pertanian dikenal sebagai organisasi agraris religius yang ada di Bali sejak dahulu. Subak sebagai lembaga yang berperan di bidang pertanian dalam arti yang seluas-luasnya mulai dari proses pengolahan lahan, pembibitan, pola dan tata cara tanam, pemeliharaan sampai kepada pengolahan serta pemasaran hasil-hasilnya. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi dinyatakan bahwa Subak adalah masyarakat hukum adat Bali yang bersifat sosio agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari berbagai sumber air di dalam suatu daerah. Subak dapat eksis apabila tetap memiliki lahan pertanian, berkaitan dengan hal ini upaya yang dilakukan adalah berupaya tetap mempertahankan lahan pertanian di Kota Denpasar atau meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan.

Berdasarkan digitasi dan pemetaan lahan subak Kota Denpasar Tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Udayana menghasilkan bahwa luasan lahan sawah irigasi pertanian adalah 1.958 Ha. Bila dibandingkan dengan data Tahun 2018, terjadi penurunan lahan sawah sebesar 212 Ha pada Tahun 2019. Penurunan ini disebabkan adanya alih fungsi lahan menjadi perumahan/permukiman akibat peningkatan jumlah penduduk.

Upaya untuk mempertahankan lahan pertanian terus dilakukan, antara lain melalui pemberian insentif kepada petani berupa pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada areal sawah yang berada dalam Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 0%, disamping peningkatan kapasitas subak baik berupa manajemen, komoditi pertanian maupun pembenahan infrastruktur

irigasi. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan inovasi pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT). Inovasi ini diharapkan dapat berperan serta dalam upaya peningkatan produksi/produktifitas hasil pertanian di Kota Denpasar meliputi kemudahan distribusi benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian serta aksesibilitas pengangkutan hasil pertanian. Selain itu pembangunan Jalan Usaha Tani ini juga diharapkan bisa menjadi destinasi wisata baru (*agrowisata/ecotourism*), yang secara tidak langsung dapat menekan laju alih fungsi lahan di Kota Denpasar.

Indeks Tri Hita Karana merupakan indeks spesifik daerah, Philosophy Tri Hita Karana menekankan pada konsep keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*) dan manusia dengan alam (*palemahan*), yaitu :

(a) Partisipasi *Krama* pada Bidang *Parhyangan*

1. Partisipasi *krama* dalam pembangunan, penataan, dan pemeliharaan tempat suci keagamaan;
2. Partisipasi *krama* dalam pembinaan keagamaan;
3. Partisipasi *krama* dalam peningkatan kualitas aktivitas sosial keagamaan;
4. Partisipasi *krama* dalam lembaga keagamaan;
5. Partisipasi *krama* dalam mewujudkan tri kerukunan umat beragama (sesama umat beragama, antar-umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah).

(b) Partisipasi *Krama* pada Bidang *Pawongan*

1. Partisipasi *krama* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Partisipasi *krama* dalam organisasi sosial kemasyarakatan;
3. Partisipasi *krama* dalam aktivitas sosial, seni, dan budaya;

4. Partisipasi *krama* dalam mendukung program-program pemerintah di bidang sosial kemasyarakatan;
 5. Partisipasi *krama* dalam menciptakan kerukunan, keamanan, dan kedamaian di masyarakat.
- (c) Partisipasi *Krama* pada Bidang *Palemahan*
1. Partisipasi *krama* dalam pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas umum;
 2. Partisipasi *krama* dalam tata ruang dan wilayah;
 3. Partisipasi *krama* dalam memelihara kualitas ruang publik;
 4. Partisipasi *krama* dalam menjaga kualitas tanah, air, dan udara;
 5. Partisipasi *krama* dalam menjaga kebersihan, keasrian, dan kelestarian lingkungan sekitarnya.

Untuk meningkatkan Indeks Tri Hita Karana dilakukan Program Pengembangan Nilai Budaya, yaitu :

- (1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- (2) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
- (3) Pengembangan nilai budaya dan keagamaan
- (4) Pembinaan *Utsawa Dharma Gita*

Indeks Tri Hita Karana pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 80,01 sementara realisasinya adalah sebesar 95,50. Dari data tersebut capaian kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 119,36%. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian Indeks Tri Hita Karana antara lain adanya dukungan Lembaga-lembaga Kemitraan yang bersifat tradisional seperti *Sekaa-sekaa* kesenian yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan kebudayaan Bali.

2) Sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan dengan memberi ruang untuk mengikuti pesta kesenian, baik tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi salah satu kekuatan pariwisata di Kota Denpasar.

Pelestarian dan Pengembangan budaya di Kota Denpasar Tahun 2019 dilakukan melalui 2 program dan 9 kegiatan, yaitu :

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, kegiatannya :
 - a. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
 - b. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
 - c. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
 - d. Denpasar Film Festival
 - e. Kreativitas seni tradisional
 - f. Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah
 - g. Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, kegiatannya :
 - a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - b. Penyelenggaraan festival budaya daerah.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA						
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :						N/A

Indikator sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan pada Tahun 2019 belum dapat dihitung dikarenakan belum ada yang melaksanakan pengukuran, namun usaha-usaha untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan even budaya.

Sekaa yang ikut terlibat dalam festival budaya daerah pada Tahun 2019 berjumlah 106 sekaa dengan pencapaian kinerjanya sebesar 100%. Capaian ini didukung dengan pembinaan yang terus menerus dilakukan dan memberikan ruang yang lebih, baik kepada sekaa, sanggar maupun sekolah untuk ikut serta dalam berbagai even kesenian yang dilaksanakan di Kota Denpasar, seperti:

- Pesta Kesenian Bali.
- Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik.
- Festival ogoh-ogoh.
- Pementasan rutin sanggar setiap hari sabtu dan minggu di lapangan Puputan Badung.
- Pementasan wayang kulit pada setiap Rahina Purnama dan Tilem dan hari-hari tertentu di Pura Jagatnatha.
- Pelaksanaan pementasan Maha Bandana Prasadha yang dilandasi dengan spirit Puputan Badung.

- Pelaksanaan Denpasar Festival dan melepas matahari
- sebagai puncak kesenian di Kota Denpasar setiap akhir Tahun.
- Kaderisasi Pelestarian Budaya.
- Misi Kesenian ke Luar Daerah.
- Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali.
- Pelatihan untuk anak sekolah saat liburan.

Terkait dengan Ogoh-ogoh yang biasanya dibuat oleh kaum remaja Bali sebagai suatu bagian dari perayaan Tahunan “upacara pembersihan” (ngerupakan) yang dilaksanakan sehari sebelum perayaan Nyepi, semua Sekaa Teruna Teruni (organisasi pemuda di tingkat banjar) yang ada di Denpasar terlibat aktif dalam keikutsertaan parade ogoh ogoh ini sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerjanya 100%. Pembinaan kepada STT salah satunya melalui lomba ogoh ogoh berupaya terus dilakukan, agar kreatifitas, gotong royong, seni gamelan, seni tari dan seni anyaman dapat terus dijaga bahkan dikembangkan sebagai salah satu aset budaya.

Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur

Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi

kebutuhannya. Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur pada Tahun 2019 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Mengentaskan Kemiskinan
- b. Mengurangi Pengangguran
- c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
- d. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat
- e. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
- f. Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan
- g. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

3) Sasaran Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Mengentaskan Kemiskinan

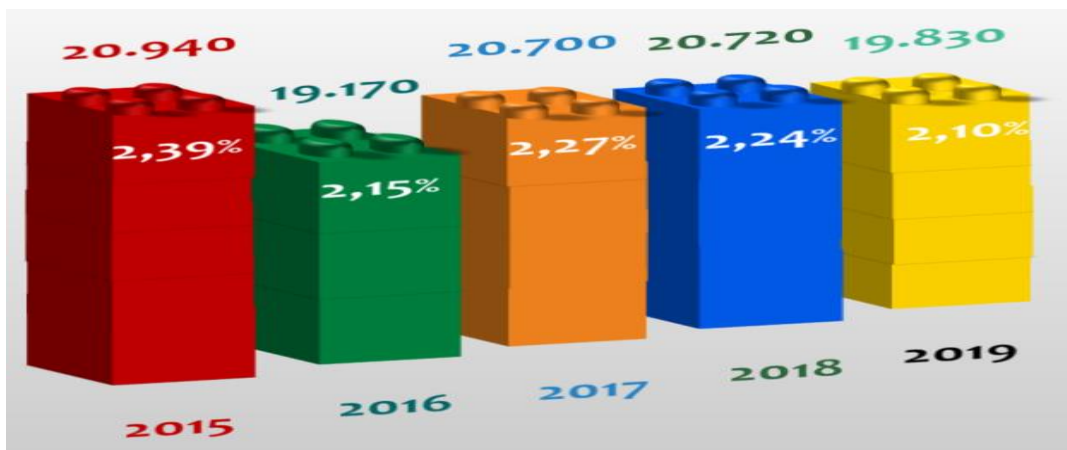
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 3 : MENGENTASKAN KEMISKINAN						
4	Angka Kemiskinan	Persen	2,24	2,07	2,1	98,55
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :					98,55

Dari Tabel 3.5 diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Mengentaskan Kemiskinan dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 2,07%, Capaian kinerja sasaran ini sebesar 98,55%. Bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018 terjadi penurunan kemiskinan sebesar 6,25% dari kondisi Tahun 2018 sebesar 2,24% menjadi 2,10% pada Tahun 2019.

Penyebab kemiskinan di Kota Denpasar antara lain jumlah pendatang yang cukup tinggi. Tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai untuk bertahan hidup di Kota Denpasar. Akibatnya, banyaknya pendatang justru membawa pada masalah pengangguran yang akhirnya berdampak pada kemiskinan penduduk di Kota Denpasar. Tingkat Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) yang sangat kecil ($P1=0,29$ & $P2=0,06$ pada Tahun 2019). Secara kuantitas jumlah penduduk miskin Kota Denpasar turun, yaitu dari 20.720 jiwa pada Maret 2018 menjadi sebanyak 19.830 jiwa pada Maret 2019. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskian adalah melalui 2 (dua) pendekatan yaitu melalui peningkatan pendapatan dan mengurangi pengeluaran.

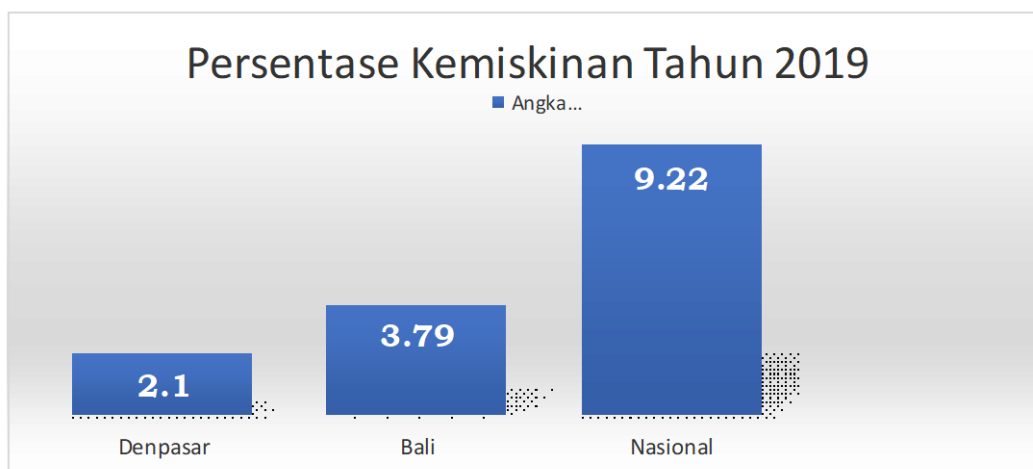
Penambahan pendapatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM (Diklat, magang dan sertifikasi) serta Pemberdayaan (permodalan, pendampingan, Kube, Pemanfaatan Teknologi, dan Pemasaran). Pengurangan pengeluaran dapat dilakukan melalui pendidikan, kesehatan, papan, pangan, pengganti produktivitas, dan santunan kematian. Data kemiskinan di Kota Denpasar selengkapnya disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2
Potret Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kota Denpasar Tahun 2019

Gambar 3.3
Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2019



Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan Gambar 3.3 diatas dapat diketahui bahwa Angka Kemiskinan di Kota Denpasar pada Tahun 2019 dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional adalah lebih rendah. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Angka Kemiskinan Kota Denpasar pada Tahun 2019 lebih rendah sebesar 44,59%. Sedangkan bila dibandingkan Nasional, Angka Kemiskinan Kota Denpasar lebih rendah sebesar 77,22%.

Upaya dalam mengurangi kemiskinan di Kota Denpasar sudah diintegrasikan dalam bentuk sinergitas antar Perangkat Daerah terkait melalui inovasi Kota Tangguh Sosial. Kota Tangguh Sosial mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Tangguh Sosial, dimana Daerah Tangguh Sosial adalah Daerah yang melalui berbagai program inovasi sehingga memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman masalah kesejahteraan sosial, dan mampu melakukan mitigasi dengan segera dari dampak masalah kesejahteraan sosial yang merugikan.

Penyelenggaraan Daerah Tangguh Sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggara Layanan Daerah Tangguh Sosial meliputi *Customer Service* Layanan Tangguh Sosial, Pelaksana SLRT Daerah Cemerlang dan Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik terkait masalah kesejahteraan sosial. Jenis layanan Daerah Tangguh

Sosial berdasarkan ruang lingkupnya meliputi Layanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial.

4) Sasaran Mengurangi Pengangguran

Secara umum pengangguran diartikan sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Capaian sasaran kinerja Mengurangi Pengangguran pada Tahun 2019, ditampilkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Mengurangi Pengangguran

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 4 : Mengurangi Pengangguran						
5	Angka Pengangguran	Persen	1,82	3,35	2,22	133,73
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :					133,73

Capaian Sasaran Strategis Mengurangi Pengangguran dengan Indikator Sasaran Angka Pengangguran, penghitungan terhadap TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) pada Tahun 2019 tercapai 2,22 % dari target 3,35 %. Pencapaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 133,73%. Dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018, maka tingkat pegangguran terbuka meningkat sebesar 21,97% di Tahun 2019. Bila

dibandingkan dengan Kabupaten lain di Bali, maka TPT Kota Denpasar menempati urutan kedua setelah Kabupaten Buleleng. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah :

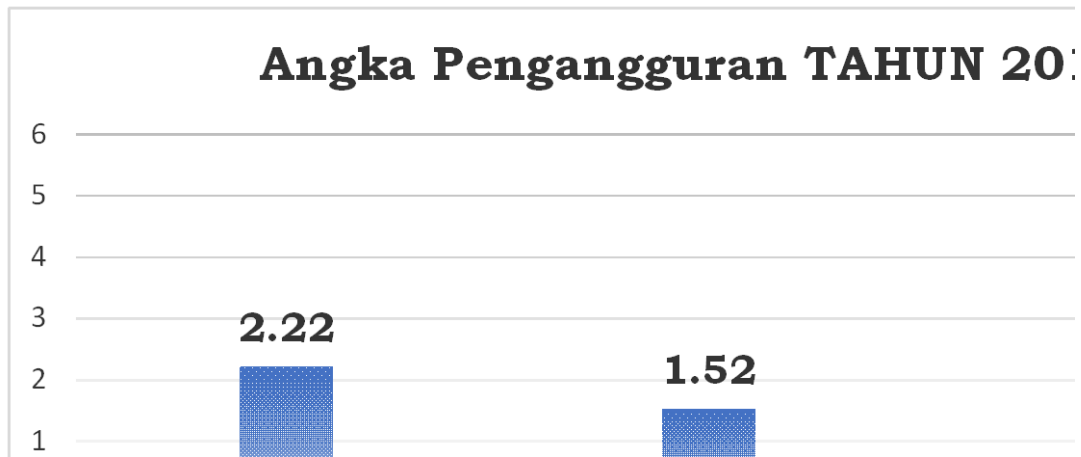
- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
- Meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan
- Pengembangan hubungan industrial

Tabel 3.7
Perbandingan TPT dan TPAK se-Bali Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	TPT (%)		TPAK (%)	
	2018	2019	2018	2019
Kab. Jembrana	1.38	1.42	77.45	67.52
Kab. Tabanan	1.43	1.28	77.46	75.56
Kab. Badung	0.44	0.38	71.44	72.67
Kab. Gianyar	1.60	1.42	79.10	76.21
Kab. Klungkung	1.41	1.54	78.11	76.21
Kab. Bangli	0.80	0.72	85.85	83.20
Kab. Karangasem	0.99	0.60	82.50	80.68
Kab. Buleleng	1.84	3.02	76.87	69.67
Kota Denpasar	1.82	2.22	73.75	71.71
Bali	1.37	1.52	76.78	73.87

Sumber : BPS Kota Denpasar Tahun 2019

Gambar 3.4
Perbandingan Angka Pengangguran Kota Denpasar,
Provinsi Bali Dan Tahun 2019



Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan Gambar 3.4 diatas, dapat diketahui bahwa Angka Pengangguran di Kota Denpasar lebih rendah sebesar 55,69% dari Angka Pengangguran Nasional. Sedangkan, bila dibandingkan dengan Angka Pengangguran Provinsi Bali, terlihat bahwa Angka Pengangguran Kota Denpasar lebih tinggi sebesar 46,05% dari Provinsi Bali. Angka pengangguran Kota Denpasar berada pada urutan kedua setelah Kabupaten Buleleng yang Angka Penganggurannya 3,02%.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan telah melakukan beberapa hal diantaranya menyediakan informasi yang seluas – luasnya bagi pencari kerja terkait kesempatan kerja, lowongan kerja maupun even – even berupa kegiatan bursa kerja, kegiatan job canvassing maupun bimbingan penyuluhan jabatan. Dalam penyebarluasan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dengan biaya murah, mudah dan

cepat. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan nama BKOL (Bursa Kerja Online), Aplikasi BKOL sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Portal atau Website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar terhubung dengan Sistem Informasi Kartu Pencari Kerja AK/I (Kartu Kuning). Berdasarkan Database AK/1 sampai bulan Desember 2019 maka diperoleh data pencari kerja terdaftar sebanyak 4.722 orang yang terdiri dari 2.311 laki – laki dan 2.411 perempuan. Dari 4.722 orang pencari kerja sebanyak 281 orang sudah ditempatkan (143 laki – laki dan 138 perempuan).



Berdasarkan data jumlah pengangguran di Provinsi Bali pada Tahun 2019 adalah sebesar 37.551 dimana terdapat 11.589 pengangguran di Kota Denpasar. Dalam usaha untuk mengurangi/

menekan jumlah pengangguran di Kota Denpasar telah diselenggarakan JOB FAIR dengan harapan agar tenaga kerja yang ada di Kota Denpasar dapat terserap ke dunia kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pencari kerja.

5) Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat Kesehatan Masyarakat merupakan gambaran kemampuan/Kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator Kesehatan, kemampuan Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan sehingga mampu

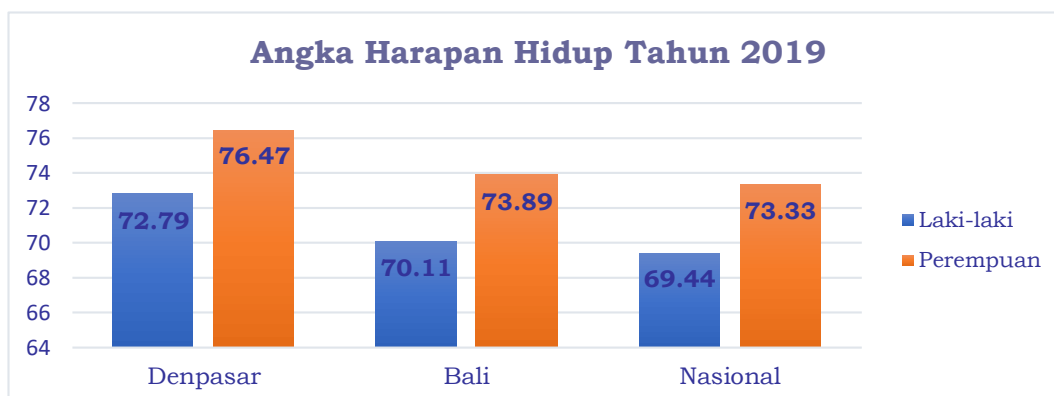
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain.

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 5 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT						
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,27	73,39	74,68	101,76
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5 :					101,76

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup pada Tahun 2019 yaitu 74,68 Tahun.

Gambar 3.5
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar,
Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2019



Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan Gambar 3.5 diatas dapat diketahui bahwa Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Denpasar baik laki-laki maupun perempuan berada diatas capaian angka harapan hidup Provinsi Bali dan Nasional. Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar pada Tahun 2018 mencapai 74,38 Tahun. Pada Tahun 2019 di targetkan sebesar 73,39 Tahun, dapat terealisasi 74,68 Tahun (101,76%). Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar dapat tercapai dari beberapa indikator kesehatan yang telah dicapai yaitu :

a. Angka Kematian Ibu

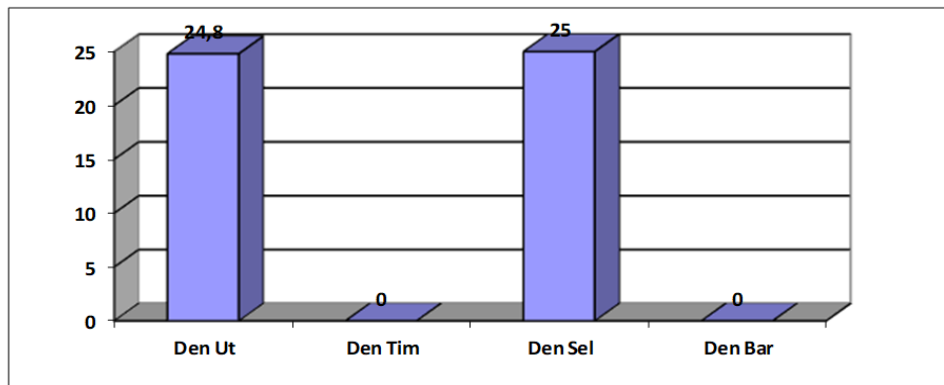
Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, dan pelayanan kesehatan waktu melahirkan.

Dalam tiga Tahun terakhir angka kematian ibu di Kota Denpasar sudah dapat ditekan. Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar Tahun 2019 (12 per 100.000 KH) lebih rendah bila dibandingkan Tahun 2018 (24 per 100.000 KH) dan sudah lebih rendah dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2018 (56 per 100.000 KH). Jika dibandingkan dengan target Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan, demikian pula jika dibandingkan dengan AKI provinsi Bali Tahun 2018 sebesar 54,03/100.000 KH.

Selama Tahun 2019 di Kota Denpasar terjadi 2 kematian ibu dari 16.538 Kelahiran hidup yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 1 orang ibu nifas. Kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh karena Perdarahan 1 orang, dan 1 orang karena sebab lainnya.

Di Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu terdistribusi di 4 kecamatan seperti terlihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
Berdasarkan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2019



Sumber : Seksi Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa kematian maternal tertinggi di kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Utara Sedangkan Denpasar timur dan Denpasar Barat Tahun 2019 tidak ada kematian ibu. Bila dilihat kelompok umurnya, pada Tahun 2019 kematian ibu terjadi pada kelompok umur 20-34 Tahun yaitu sebanyak 2 orang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kelompok umur 20-34 Tahun merupakan kelompok umur yang paling produktif untuk hamil dan melahirkan.

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil,

melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan.

b. Angka Kematian Bayi

Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu Tahun per 1000 kelahiran hidup pada Tahun tertentu disuatu daerah disebut Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Beberapa hal yang dapat memengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Kematian Bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi terbagi dalam beberapa upaya antara lain: 1) Untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi maka upaya yang dilakukan adalah imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata, ASI dini dan eksklusif serta pemberian antibiotika 2) untuk penyebab kematian karena asfiksia dan trauma kelahiran dilakukan upaya berupa

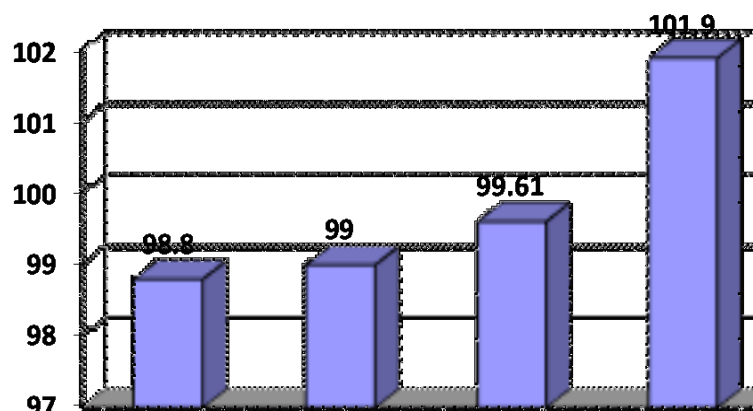
resusitasi dan penghangatan. 3) untuk mencegah kematian bayi karena kelainan kongenital dilakukan upaya yang meliputi terapi spilis bagi WUS penderita spilis dan suplementasi Folat pada ibu hamil serta peningkatan KIE pada ibu hamil.

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kunjungan nifas didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan (termasuk bidan di desa/ polindes/ poskesdes) dan kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi fundus uteri; 3) pemeriksaan lochia dan pengeluaran pervagina lainnya; 4) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Eksklusif 6 bulan; 5) pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali; dan 6) pelayanan KB pasca persalinan.

Gambar 3.7

**Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar
Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019**



Sumber: Bidang Kesmas Dikes Kota Denpasar

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan Kf-3). Indikator ini menilai kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Cakupan pelayanan ibu nifas pada Tahun 2019 adalah sebesar 100,6% sedikit menurun bila dibandingkan Tahun 2018 (101,90%). Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas berdasarkan target Renstra 2016-2021 adalah 98%. Jadi capaian pelayanan ibu nifas Kota Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan dan kinerja pelayanan untuk indikator ini termasuk katagori baik.

d. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Untuk menanggulangi rumah tangga yang rawan terhadap penyakit infeksi dan non infeksi, maka setiap rumah tangga yang ada perlu diberdayakan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk mencapai rumah tangga ber PHBS, terdapat 10 perilaku hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu:

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
2. Memberi ASI eksklusif
3. Menimbang balita setiap bulan
4. Menggunakan air bersih
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
6. Menggunakan jamban sehat
7. Memberantas jentik di rumah seminggu sekali
8. Makan buah dan sayur setiap hari
9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari
10. Tidak merokok di dalam rumah

e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Seluruh puskesmas di Kota Denpasar sudah berperan sebagai puskesmas santun lansia sehingga capaian kinerja ini sudah 100%. Pada Tahun 2019 terdapat 68.765 jiwa penduduk usia lanjut di Kota Denpasar, dari jumlah tersebut 22.056 orang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (37,9%). Rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena keterbatasan sarana skrining untuk lansia. Kedepannya perlu diperbaiki perencanaan anggaran dan advokasi ke pemegang kebijakan sehingga anggaran untuk pelayanan kesehatan lansia bisa disiapkan secara optimal dan capaian kinerja ini bisa ditingkatkan.

6) Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pendidikan menjadi faktor penting dalam sebuah pembangunan. Keberadaan SDM yang handal, akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas pula. Isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Denpasar pada Pendidikan antara lain :

1. Migrasi Penduduk sebagai konsekuensi daerah Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, maka Kota Denpasar mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang diikuti dengan penambahan kelompok umur usia sekolah (Umur 2 – 15 Tahun) yang wajib dan berhak memperoleh pendidikan.
2. Untuk menampung kelompok umur usia sekolah diperlukan ketersediaan sekolah (Ruang Kelas) yang memadai sesuai jenjang pendidikan berdasarkan kelompok umur.

3. Untuk kepastian kelompok usia sekolah dapat mengenyam pendidikan yang layak, maka dilakukan penambahan daya tampung baik melalui peningkatan kapasitas terpasang maupun pembangunan unit sekolah baru.
4. Untuk menampung kelompok umur usia sekolah diperlukan Sumber daya manusia yang memadai dari segi kompetensi, kualitas, maupun kuantitas.
5. Kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kompetensi maupun kuantitas merupakan kendala dalam upaya menuju pelayanan prima kependudukan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan kepemudaan dan olahraga mutlak diperlukan guna mewujudkan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami mengenai pentingnya pendidikan kepemudaan dan olahraga diperlukan sosialisasi tentang ketentuan – ketentuan administrasi.
8. Penuntasan pengembangan tempat pelayanan pendidikan kepemudaan dan olahraga disetiap Kecamatan sebagai upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
9. Kebijakan pendidikan dari Pemerintah perlu direalisasikan melalui koordinasi dan dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota.

Untuk menangani isu strategis pada bidang Pendidikan, Pemerintah Kota Denpasar ditempuh dengan mengarahkan kebijakan sebagai berikut.

1. Meningkatkan akses, pelayanan dan mutu pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin, dengan mengoptimalkan dukungan masyarakat (stakeholder) untuk memberikan peluang yang lebih besar terhadap akses masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja dengan menciptakan sistem pelayanan bidang pendidikan sesuai dengan tuntutan paradigma baru seperti revitalisasi, refungsionalisasi dan restrukturisasi terhadap sistem yang kurang responsif
3. Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun termasuk pendidikan usia dini dan TK secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia yang berlandaskan budaya Bali dan Agama Hindu.
4. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara.
5. Memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dan menciptakan peluang peningkatan kualitas SDM melalui kerjasama bidang pendidikan.
6. Meningkatkan daya saing SDM dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai standar pendidikan nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta meningkatkan kualifikasi minimum bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

8. Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.
9. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan.
10. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik dan wawasan kebangsaan dikalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme, pluralitas sosial dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik.
11. Meningkatnya aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
12. Meningkatkan penguasaan IPTEK dan penerapan teknologi tepat guna secara optimal guna mendukung program pembangunan Kota Denpasar.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
14. Membentuk pusat kajian bersama antara pemerintah Kota Denpasar dengan Lembaga Pendidikan serta lembaga lainnya pada bidang pengembangan IPTEK.
15. Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor.

16. Mengoptimalkan kualitas kelembagaan pendidikan politik, pembinaan kepemimpinan, pengembangan potensi kewirausahaan, dan peningkatan keunggulan penguasaan iptek pemuda.
17. Membudayakan sportivitas olahraga sebagai elemen penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan keunggulan daya saing.
18. Menumbuhkembangkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia sejak dini melalui pembinaan dan pengembangan olahraga di sekolah.
19. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.
20. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
21. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga termasuk kesehatan olahraga.
22. Meningkatkan minat / budaya baca masyarakat.

Hasil Analisis pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat pada Tahun 2019 terlihat seperti Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 6 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT						
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12,57	12,57	12,96	103,10
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6 :					103,10

Indeks Pendidikan pada Tahun 2019 adalah 12,96. Realisasi Tahun 2019 meningkat dibandingkan Tahun 2018 dimana Indeks Pendidikan Tahun 2018 adalah 12,57. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dilihat dari Indeks Pendidikan Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 103,10% (Baik Sekali). Adapun indikator pendukung capaian indeks pendidikan tersebut tercantum pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Tabel Capaian Indikator Pendidikan Kota Denpasar
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	%	12.57	12.57	12.96	103.10
		a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	11.16	11.16	11.23	101.79
		b. Angka Harapan Lama Sekolah	%	13.98	13.98	14.01	100.21
		APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	%	99	75.00	100	133.33
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI	%	103	103.00	103.47	100.46
		APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	%	92.08	92.08	96.80	105.13
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs	%	96.80	102.10	98.35	96.33
		APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs	%	91.26	91.26	95.05	104.15
		Angka Melek Huruf	%	98.05	98.05	99.31	101.29
		Rasio Guru dan Murid:					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. SD/MI/ Paket A	%	20	20	21	105.00
		b. SMP/MTs/ Paket B :	%	21	21	21	100.00
		Fasilitas Pendidikan:					
		a.Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik	%	240	240	247	102.91
		b.Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi bangunan baik	%	69	69	74	107.24
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda	%	96	96	98	102,08
		Terlaksananya a kreativitas di kalangan remaja	%	94	94	95	101,06
		Terlaksananya a Peringatan Hari Besar Nasional	%	100	100	100	100
3	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Peringkat dalam kegiatan Olahraga Provinsi	%	Juara Umum 1	Juara Umum 1	Juara Umum 2	
		a.Perolehan medali emas	%	225	225	278	123.55

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2019

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Pendidikan Tahun 2018 maka dapat dilihat bahwa, angka melek huruf 99.31 persen yang berarti bahwa 99.31 persen penduduk Denpasar sudah dapat membaca dan menulis. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga menentukan keberhasilan program pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar Tahun 2019 sebesar

11,23 Tahun. Angka Partisipasi Sekolah untuk umur 7-12 Tahun sebesar 100 persen, Angka Partisipasi Sekolah umur 13-15 Tahun sebesar 98,42 persen dan Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 Tahun sebesar 73,74 persen. Secara rinci dapat diuraikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11

Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	2	4	5	6
1	Angka Melek Huruf (persen)	98.7	98.68	99.30
	- Laki-Laki	99.7	99.1	99.67
	- Perempuan	97.7	96.88	98.93
2	Rata-rata Lama Sekolah (persen)	11.15	11.20	11.23
3	Angka Partisipasi Sekolah (persen)			
	7 – 12 Tahun	98.93	99.62	100
	13 – 15 Tahun	98.57	99.17	98.42
	16 – 18 Tahun	80.22	73.1	73.74

Sumber :BPS Kota Denpasar, 2019 (data diolah)

7) Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan memang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan gender, penegakan hak asasi manusia, penegakan martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama dalam kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan manusia, kesatuan ekologi, kesetaraan, dan keadilan

sosial generasi saat ini dan dimasa mendatang. Sehingga sangat jelas bahwa kesetaraan gender merupakan isu utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Isu kesetaraan gender di Kota Denpasar antara lain :

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD), yang juga dipengaruhi oleh faktor budaya
2. Belum maksimalnya tingkat pendidikan perempuan, serta belum beraninya perempuan untuk tampil dan perempuan juga disibukkan mengurus RT
3. Belum Optimalnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
4. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan KB

Kebijakan pembangunan gender di Kota Denpasar diarahkan pada :

1. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik melalui perumusan kebijakan, sosialisasi, advokasi partai politik, advokasi organisasi perempuan dan Pelatihan pendidikan politik perempuan.
2. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi melalui perumusan kebijakan, sosialisasi, advokasi pelatihan di bidang ekonomi.
3. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak terkait, koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengembangan KIE, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, serta pencatatan data kekerasan/kasus perempuan dan/atau anak.

4. Penguatan kelembagaan dan pembentukan kelembagaan layanan kualitas keluarga melalui Advokasi dan sosialisasi kebijakan, koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak pada Tahun 2019 dirinci pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 7 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK						
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	96,88	78,50	96,89	123,43
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks	58,80	60,00	58,25	97,08
10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Utama	120,00
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7 :					113,50

Dari Tabel 3.12 di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender realisasinya melampaui target, indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender realisasinya tidak mencapai target dan indikator sasaran kategori kota layak anak

mencapai target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 sebesar 113,50% (Baik Sekali) dimana capaian ini meningkat 10,23% dari Tahun 2018 yang rata-rata capaian kinerja sasarannya sebesar 103,27%.

Data Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019 dari target 78,50 didapatkan realisasi sebesar 96,89. Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indek Pembangunan Manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan Indek Pembangunan Manusia, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai Indek Pembangunan Manusia sama dengan Indeks Pembangunan Gender. Sedangkan Indek Pembangunan Manusia Kota Denpasar adalah 82,27 sehingga di Kota menunjukkan bahwa tingginya capaian pembangunan manusia di Kota Denpasar diikuti dengan capaian kesetaraan gendernya, tingginya pembangunan manusia yang dicapai, sejalan dengan kesetaraan gender yang diperoleh juga. Indek Pemberdayaan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Pada Tahun 2019 dari target Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 60 hanya terealisasi 58,25. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam politik, dimana pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Denpasar hanya terdapat 2 (dua) anggota Dewan Perempuan terpilih.

Indek Pembangunan Gender dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender. Titik berat pembangunan gender adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak di Kota Denpasar Tahun 2017-2019 ditampilkan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
Kota Denpasar Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Gender	96,07	96,88	96,89
2	Indek Pemberdayaan Gender	58,50	58,80	58,25
3	Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama

Sumber: DP3AP2KB, 2020

8) Sasaran Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan

Untuk penataan kawasan kumuh, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* pengelolaannya dibagi menjadi 3 (Tiga) kewenangan, yaitu untuk kawasan kumuh sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan

Pemerintah Kota/Kabupaten untuk menanganinya, untuk kawasan kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan 15 Ha penanganannya ada pada Pemerintah Provinsi sedangkan untuk luas kawasan kumuh yang melebihi dari 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk penanganannya.

Permukiman kumuh perkotaan yang terjadi di Kota Denpasar memiliki karakteristik tersendiri, dimana kekumuhan terjadi pada lahan persil hak milik, yang disewakan dalam waktu jangka panjang. Sinergitas penanganan permukiman kumuh terus dilakukan sehingga terjadi keterpaduan pendanaan dan program antara pemerintah pusat dengan daerah maupun antar Perangkat Daerah di Kota Denpasar, termasuk peran swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan SK Walikota Denpasar Nomor 188.45/1450/HK/2016 tanggal 30 Nopember 2016, di Kota Denpasar terdapat total kawasan kumuh seluas 184,4059 Ha. yang tersebar di 4 (Empat) Kecamatan di Kota Denpasar, dan kemudian diperbaharui dengan SK Walikota Denpasar Nomor 188.45/845/HK/2019 tanggal 15 April 2019 yang menyatakan bahwa total luas kawasan kumuh di Kota Denpasar tersisa seluas 82,6076 Ha. (Setelah adanya penambahan kawasan kumuh di TPA Suwung desa Pemogan seluas 25,2 Ha.). Dari total luasan kawasan kumuh yang terdapat di Kota Denpasar tersebut, yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Denpasar untuk menanganinya adalah seluas 23,8448 Ha. Pada Tahun 2019 lokasi pelaksanaan pengentasan kawasan kumuh terletak di Jl. Bedahulu VII, Jl. Nusa Indah dan Jl. Bung Tomo VI, dengan penataan berupa pemavingan jalan lingkungan, drainase dan pembuatan taman (*planter box*). Secara rinci Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman umuh di kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh di Kota Denpasar

Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar No : 188.45/1450/HK/2016					Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar No. : 188.45/845/HK/2019	
Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar					Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh	
No	Nama Ruas / Kawasan	Banjar / Dusun	Desa / Kelurahan	Luas (Ha)	Nama Lokasi	Luas (Ha)
Denpasar Timur						
1	Jl. Jayagiri XXII	Br. Eka Darma	Sumerta Kauh	0,3577		
2	Gg. Sanggaha Kriya Asta	Br. Tohpati	Kesiman Kertalangu	9,2472	Jl. Ulun Carik	1,13
3	Jl. Tegal Harum Gg. Sakura dan Gg. Seruni	Br. Biaung Asri	Kesiman Kertalangu	0,4411		
4	Jl. SMA 3 Gg VI	Br. Lebah	Sumerta Kaja	4,2789	Jl. SMA 3 Gg VI	1,57
5	Jl. Nusa Indah Gg. XIIIa No 6X, Gg XX, Gg. XXI	Br. Abiankapas Klod	Sumerta	0,9875	Jl. Nusa Indah Gg XXI	0,45
6	Jl. Badak Agung VII dan VIII	Br. Badak Sari	Sumerta Klod	2,4953		
7	Jl. Merdeka II dan III	Br. Tanjung Bungkak	Sumerta Klod	2,1209		
8	Jl. WR. Supratman Gg 2D	Br. Kedaton	Kesiman Petilan	7,1317	Jl. WR. Supratman Gg 2D	7,1317
9	Jl. Waribang Gg I a	Br. Kedaton			Jl. Waribang Gg I a	
	Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Denpasar Timur			27,0603	Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Denpasar Timur	10,2817
Denpasar Barat						
1	Jl. P. Buru sekitar No. 32B	Br. Catur Panca	Dauh Puri	0,8349	Jl. P. Buru sekitar No. 32B	0,8349

Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar No : 188.45/1450/HK/2016					Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar No. : 188.45/845/HK/2019	
Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar					Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh	
No	Nama Ruas / Kawasan	Banjar / Dusun	Desa / Kelurahan	Luas (Ha)	Nama Lokasi	Luas (Ha)
2	Jl. P. Misol Gg. VB	Br. Sumuh	Dauh Puri Kauh	0,3906	Jl. P. Misol Gg. VB	0,3906
3	Gg. Dahlia dan Gg. Cempaka	Br. Jematang	Dauh Puri Kauh	3,784	Gg. Dahlia dan Gg. Cempaka	3,784
4	Jl. Gn. Batur Gg. Tunjung Biru dan Gg. Klampit	Br. Penyaitan	Pemecutan	5,9706		
5	Br. Kerandan Gg. Dahlia dan Gg. Nangka	Br. Kerandan	Pemecutan	1,5438	Br. Kerandan Gg. Dahlia dan Gg. Nangka	0,28
6	Jl. Kertapura Segina Utara	Br. Pekandelan	Pemecutan Klod	21,4902		
7	Jl. Imam Bonjol Gg. 7	Br. Tegal Gede	Pemecutan Klod	0,3417		
8	Jl. Buana Kubu Gg. Genta, Gg. Amla	Br. Buana Kubu	Tegal Harum	0,564	Jl. Buana Kubu Gg. Genta	0,23
9	Br. Manut Negara, Jl. Merpati VII dan Jl. Resimuka Barat VII	Br. Buana Asri	Tegal Kerta	6,0387		
	Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Denpasar Barat			40,9585	Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Denpasar Barat	5,5195
Denpasar Selatan						
1	Gg. Tkd. Grembengan	Br. Batan Poh	Sanur Kaja	0,5834	Gg. Tkd. Grembengan	0,5834
2	Jl. Hang Tuah Gg. Mawar	Br. Belong	Sanur Kaja	4,7211		
3	Gg. Ikan Teri	Br. Pegok	Sesetan	2,1692		
4	Jl. Tunggak Bingin Blok i	Br. Bet Ngandang	Sanur Kauh	1,4249		
5	Jl. Batusari Gg. 4 dan Depan Setra Madure	Br. Medure dan Br. Dangin Peken	Sanur Kauh	0,6377	Jl. Batusari Gg. 4 dan Depan Setra Madure	0,6377

Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar No : 188.45/1450/HK/2016					Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar No. : 188.45/845/HK/2019	
Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar					Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh	
No	Nama Ruas / Kawasan	Banjar / Dusun	Desa / Kelurahan	Luas (Ha)	Nama Lokasi	Luas (Ha)
6	Jl. Raya Pemogan, Gg. Sakenan	Br. Sakah	Pemogan	19,035		
7	Jl. P. Ayu Selatan	Br. Sawah	Pedungan	10,2302	Jl. P. Ayu Selatan	2,213
8	Jl. Sanitasi lingk/dsn. Grakerti, Jl. Mertasari Gg. Laksamana	Br. Graha Santhi	Sidakarya	7,2302		
					Kawasan Permukiman TPA Suwung	25,2
	Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Denpasar Selatan			46,0317	Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Denpasar Selatan	28,6341
Denpasar Utara						
1	Jl. Karya Makmur dan Gg. Kelapa Muda	Br. Pemangkalan	Ubung Kaja	17,5983	Jl. Karya Makmur dan Gg. Kelapa Muda	17,5983
2	Gg. Pudak	Br. Sedana Merta	Ubung Kaja	1,5583		
3	Ling Prajasari / Jl. Bedahulu V, VII, dan IX	Br. Tagtag Tengah	Peguyangan	2,3551		
4	Jl. Sakura Gg IV Ujung	Br. Kertabuwana	Dangin Puri Kangin	0,6055	Jl. Sakura Gg IV Ujung	0,6055
5	Br. Teruna Sari Jl. Gatot Subroto VI P, Q, R, S	Br. Teruna Sari	Dauh Puri Kaja	3,0289	Br. Teruna Sari Jl. Gatot Subroto VI P, Q, R, S	0,644
6	Jl. Buluh Indah Gg. I s/d Gg. VIII dan Jl. Jamuna III	Br. Kertasari	Pemecutan Kaja	11,5545		
7	Jl. Bung Tomo IV, V dan VI	Br. Semilajati	Pemecutan Kaja	4,4194	Jl. Bung Tomo VI	2,84

Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar No : 188.45/1450/HK/2016					Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar No. : 188.45/845/HK/2019	
Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar					Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh	
No	Nama Ruas / Kawasan	Banjar / Dusun	Desa / Kelurahan	Luas (Ha)	Nama Lokasi	Luas (Ha)
8	Jl. Wibisana Barat Gg. Taman Sari, Gg. Ayam dan Jalur Tukad Teba	Br. Mertayasa dan Br. Panti Gede	Pemecutan Kaja	13,2079	Jl. Wibisana Barat Gg. Taman Sari, Gg. Ayam dan Jalur Tukad Teba	0,52
9	Jl. Wibisana Utara Bongkol Manis	Br. Balun				
10	Jl. Ahmad Yani Selatan, Jl. Maruti (Kawasan Sekitar Wanasari)	Br. Margajati dan Br. Belong Menak	Pemecutan Kaja	16,0275	Jl. Ahmad Yani Selatan, Jl. Maruti (Kawasan Sekitar Wanasari)	16,0275
		Br. Lumintang dan Br. Wangaya Kaja	Dauh Puri Kaja			
	Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Denpasar Utara			70,3554	Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Denpasar Utara	38,2353
	Total Luas Kawasan Kumuh Kota Denpasar			184,4059	Total Luas Kawasan Kumuh Kota Denpasar	82,6706

Kewenangan :

Kabupaten / Kota	: < 10 Ha	=	Luas:	Mengacu SK 2019	
Provinsi	: 10 s/d 15 Ha	=	75,2623	Menjadi	23,8448
Pusat	: > 15 Ha	=	34,9926	Menjadi	0
			74,151	Menjadi	58,8258
Total			184,4059	Total	82,6706

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 8 : Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan						
11	Luas permukiman kumuh	Persen	40,06	20,00	23,08	115,39
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :					115,39

Berdasarkan Tabel 3.15 diatas, dapat diketahui bahwa Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar berhasil melaksanakan pengentasan kawasan kumuh seluas 5,503 Ha (dengan rincian Jl. Nusa Indah Gg. XXI seluas 0,45 Ha, Jl. Pulau Ayu Selatan seluas 2,213 Ha, Jl. Bung Tomo VI seluas 2,84 Ha) atau sebanyak 23,08 % dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar yaitu sebesar 20%. (realisasinya mencapai 115,39%). Bila mengacu pada Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1450/HK/2016, luasan Permukiman Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar adalah 75,26 Ha. Luasan Permukiman Kumuh yang dapat direalisasikan pada Tahun 2018 seluas 6,03 Ha atau sebesar 8,01% dengan realisasi 40,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yang mencapai 115,39% maka rata-rata capaian pengurangan Permukiman Kumuh pada Tahun 2019 meningkat sebesar 75,33% jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Tahun 2018.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar terkait penggunaan anggaran, pada Tahun 2019 alokasi APBD untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan adalah sebesar Rp.158.153.563,00

yang direalisasikan sebesar Rp.4.231.798.069,00 atau sebesar 82,04%. Untuk lebih jelasnya rincian kegiatan dari Program Lingkungan Sehat Perumahan dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Rincian Program Lingkungan Sehat Perumahan
di Kota Denpasar Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Lingkungan Sehat Perumahan	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keresasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	2.787.185.000	2.596.831.777	93,17
		Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	1.827.176.563	1.243.717.192	68,07
		Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	331.610.000	238.677.100	71,98
		Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	212.182.000	152.572.000	71,91
Total			5.158.153.563	4.231.798.069	82,04

Sumber : LKjIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, 2019

Berdasarkan Tabel 3.16 diatas, dapat diketahui bahwa upaya untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Denpasar dilaksanakan dengan banyak kegiatan mulai dari penyiapan regulasi, penataan kawasan permukiman kumuh sampai pada pengawasan pengendalian perluasan kawasan kumuh di Kota Denpasar. Secara

riil pencapaian target sasaran penurunan luasan kawasan permukiman kumuh adalah menggunakan anggaran Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar sebesar Rp.1.827.176.563,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.243.717.192,00 atau sebesar 68,07%. Kecilnya realisasi anggaran pada kegiatan ini disebabkan karena dari 3 (tiga) pekerjaan penataan kawasan kumuh yang proses pelaksanaannya melalui tender dan mendapatkan hasil penawaran dari rekanan rata-rata di bawah 70%, antara lain :

- a) Pekerjaan penataan kawasan kumuh di Denpasar Timur, dari pagu anggaran Rp.500.000.000,00 dimenangkan oleh rekanan dengan penawaran sebesar Rp.341.588.256,15 (68,32%) dan terjadi efisiensi sebesar 31,68%
- b) Pekerjaan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Peguyangan, dari pagu anggaran Rp. 500.000.000,00 untuk 2 lokasi pada dokumen perencanaan, hanya bisa dilaksanakan pada 1 lokasi karena permasalahan status lahan. Sehingga hanya bisa digunakan dana sebesar Rp. 324.3947.662,93 (nilai HPS) untuk lokasi yang dimaksud (64,88%) dari pagu. Setelah melalui proses tender, diperoleh pemenang dengan penawaran Rp.222.144.508,18 (44,43% dari pagu atau sebesar 68,48% dari HPS).
- c) Pekerjaan penataan kawasan kumuh di Denpasar Utara, dari pagu anggaran Rp.550.000.000,00 dimenangkan oleh rekanan dengan penawaran sebesar Rp. 425.473.427,67 (77,36%) dan terjadi efisiensi sebesar 22,64%.

Ada beberapa Program yang mendukung pencapaian sasaran mengurangi permukiman kumuh perkotaan ini, yaitu :

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini di dukung dengan kegiatan – kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penetapan Kebijakan Strategi Penyelenggaraan

Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang

Untuk Kegiatan Penetapan Kebijakan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 merupakan komponen kegiatan yang terintegrasi dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan hasil penyelesaian kegiatan terdiri dari :

- 8 Dokumen hasil perencanaan
- 15 Lokasi pelaksanaan fisik pekerjaan
- 12 Dokumen hasil pengawasan

Hasil Pelaksanaan Fisik dari Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang Tahun 2019.

Pekerjaan Rehabilitasi Tembok Penyengker Pura Bungkeneng Desa Pekraman Tonja



Pekerjaan Pembangunan Tembok Penyengker Pura Ayun Br. Saba, Penatih



Pekerjaan Penataan Pura Nawa Sanga, Desa Pemecutan, Desa Adat Denpasar



Pekerjaan Perbaikan Gedong dan Tajuk pada Pura Dalem Tungkub Desa Pekraman Adat Pagan



b. Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar

Pada Kegiatan ini yang dilaksanakan adalah melakukan penataan kawasan kumuh untuk mengurangi luasan kumuh di Kota Denpasar. Pada Tahun 2019 ini dilaksanakan di Kelurahan Sumerta Denpasar Timur (Jl. Nusa Indah Gg. XXI), Kelurahan Peguyangan (Jl. Bedahulu) Denpasar Utara dan Desa Pemecutan Kaja (Jl. Bung Tomo VI) di Denpasar Utara. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah berupa pemavingan jalan lingkungan, pembuatan drainase dan penataan taman (Pembuatan planter box).

c. Kegiatan Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar

Pada kegiatan ini melakukan kegiatan pendataan dan pemetaan potensi keberadaan kawasan kumuh di Kota Denpasar untuk meminimalisir berkembangnya permukiman kumuh di Kota Denpasar.

d. Kegiatan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)

Kegiatan ini bertujuan mencari kawasan kumuh yang akan dijadikan prioritas untuk penanganan yang akan dilaksanakan oleh baik Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

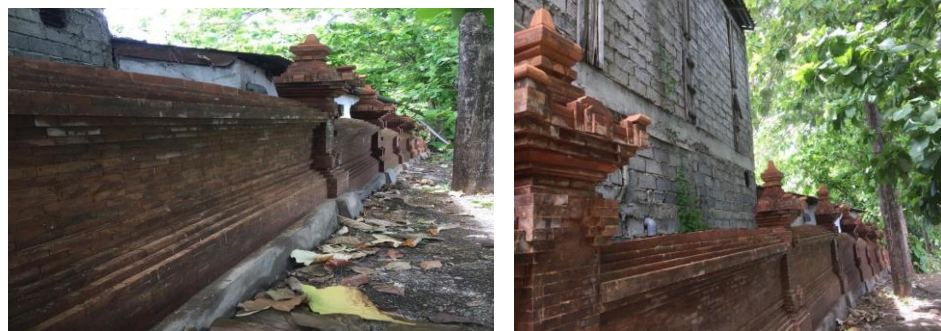
Untuk Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 merupakan kegiatan yang mendukung

pencapaian ruang kumuh adalah dengan melakukan penataan beberapa areal pemakaman yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota. Komponen kegiatan yang terintegrasi dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan hasil penyelesaian kegiatan terdiri dari :

- 2 Dokumen hasil perencanaan
- 3 Lokasi pelaksanaan fisik pekerjaan
- 3 Dokumen hasil pengawasan

Hasil Pelaksanaan Fisik dari Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Tahun 2019, antara lain :

Pekerjaan Penataan Areal Kuburan di Dusun Lumintang Desa Dauh Puri Kaja



Penataan Pura Prajapati Dalem Kahyangan Badung, Setra Badung, Desa Pakraman Denpasar



Dalam upaya untuk mengurangi luasan permukiman kumuh di Kota Denpasar, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar melaksanakan upaya sinergitas dan kolaborasi dengan stakeholder yang terlibat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penurunan luas permukiman kumuh di Kota Denpasar antara lain :

- a. Dari 36 kawasan yang ada berdasarkan perhitungan analisa numerik Peraturan Menteri PU Nomor 2 Tahun 2016, semuanya termasuk katagori kumuh ringan, fokus penanganan bisa lebih terarah pada indikator jalan dan drainase untuk menurunkan skor kumuh.
- b. Penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan melibatkan semua pihak, baik pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kota, Desa/Kelurahan serta pemilik lahan sendiri.
- c. Luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha juga dilaksanakan kolaborasi antar Perangkat Daerah teknis (Dinas PUPR dan Dinas Perkim) dan dengan pihak Desa dengan memprioritaskan penggunaan dana desa dalam program dan kegiatan pengurangan luasan permukiman kumuh di wilayah kerjanya masing-masing.
- d. Inovasi yang dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh adalah dengan ikut melibatkan pihak swasta melalui bantuan CSR (*Coorporate Social Responsibility*).

9) Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Kota Denpasar tumbuh dan berkembang menjadi kota metropolitan dengan beragam aktivitas yang membutuhkan kecepatan mobilitas. Disisi lain Kota Denpasar juga merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perekonomian dan

jasa lainnya dan terletak pada lintasan pergerakan penduduk antar kabupaten.

Kondisi dan ketersediaan infrastruktur di Kota Denpasar sudah cukup memadai dan berkualitas baik, namun demikian masih dibutuhkan pemerataan serta peningkatan kualitas dan kuantitas baik melalui pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun.

Tantangan permasalahan pembangunan infrastruktur yang harus disikapi antara lain kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, peraturan pemerintah yang sering berubah dan tumpang tindih antar peraturan/perundangan merupakan tantangan permasalahan eksternal yang harus disikapi guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan tingkat, kondisi ketersediaan, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, serta untuk mendukung terciptanya kehidupan yang aman, produktif dan berkelanjutan sehingga terwujudnya keadaan masyarakat yang semakin sejahtera dan berdaya saing maka kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan pada :

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan kota
2. Meningkatkan kualitas dan dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat

3. Mengendalikan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir
4. Mengembangkan pengelolaan persampahan dan air limbah secara profesional dan terintegrasi
5. Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Mengembangkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan dan tetap menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air dalam menunjang keseimbangan lingkungan hidup dalam kerangka Sarbagita
7. Mengembangkan dan tetap menjaga ekosistem sungai
8. Mengembangkan pengelolaan sistem jaringan irigasi dalam upaya pembangunan bidang pengairan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
9. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai pola ruang dan fungsi ruang di Kota Denpasar
10. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota Denpasar, termasuk pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
11. Mengembangkan pola peningkatan kualitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi melalui pembinaan dan sertifikasi keterampilan.
12. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur di Kota Denpasar pada Tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR						
12	Jalan Kondisi Baik	Meter	377.165,00	314.885,44	385.188,90	122,33
		Persen	77,59	64,78	79,52	122,75
13	Titik Genangan	Titik	6	6	4	150,00
		Persen	25,00	30,00	50,00	166,67
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	84.293	80.502	86.250	107,14
		Persen	45,29	44,96	46,80	104,09
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Orang	502.989	427.794	517.691	121,01
		Persen	54,05	47,84	54,98	114,92
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9 :					127,11

Dari Tabel 3.17 di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan indikator sudah melampaui target. Rata-rata capaiannya sebesar 127,11% (Baik sekali). Bila dibandingkan rata-rata capaian Tahun 2018 yang sebesar 99,99% (Baik) maka rata-rata capaian Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 27,12% dari Tahun 2018.

Kualitas jalan yang baik di Kota Denpasar sangat dibutuhkan, mengingat tingkat kepadatan lalu lintas dan mobilitas masyarakat yang berdomisili di Kota Denpasar maupun masyarakat

komuter yang menuju/melintasi Kota Denpasar sangat tinggi sehingga akan meningkatkan resiko keselamatan pengguna jalan apabila kondisi/kualitas jalan yang tidak baik. Jalan kondisi tidak baik menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Denpasar. Realisasi jalan kondisi baik pada Tahun 2018 adalah 77,59% atau sepanjang 377.165,10 m mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 79,27% atau sepanjang 385.188,90 m. Secara bertahap persentase kondisi jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar akan terus ditingkatkan dan dijaga. Dengan kualitas jalan yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi resiko kecelakaan dan tingkat kecelakaan pengguna jalan di Kota Denpasar.

Disamping kondisi jalan yang baik, umur pelayanan jalan juga perlu mendapatkan perhatian, mengingat semakin panjang umur pelayanan jalan maka intensitas perbaikan akan semakin berkurang sehingga keamanan, kenyamanan dan gangguan terhadap pengguna jalan dalam rangka pemeliharaan jalan akan semakin sedikit. Semakin panjang umur pelayanan jalan utama kota, mencerminkan semakin baiknya kualitas jalan dan juga akan berdampak pada semakin tingginya efisiensi anggaran untuk pemeliharaan jalan per-Tahunnya dan efisiensi biaya tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan atau pembangunan infrastruktur lainnya. Dengan semakin berkembangnya wilayah permukiman masyarakat di Kota Denpasar maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap meningkatkan aksesibilitas untuk memudahkan masyarakat ke pusat-pusat kegiatan (PK). Dengan meningkatnya aksesibilitas menuju PK diharapkan dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat sebagaimana misi pemerintah Kota Denpasar.

Kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar merupakan masalah yang mendapatkan perhatian khusus mengingat Kota Denpasar sebagai daerah pariwisata, perlintasan transportasi darat antar daerah dan antar pulau serta pusat ibukota Propinsi Bali. Kemacetan lalu lintas khususnya pada jalan utama di Kota Denpasar disebabkan berbagai faktor selain karena kualitas dan kuantitas jalan adalah disebabkan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor, tidak disiplinnya pengguna jalan dalam berlalu lintas, parkir kendaraan di badan jalan, penggunaan kendaraan bermotor (mobil) untuk mengantar dan menjemput siswa sekolah, dan banyaknya persimpangan jalan yang menyebabkan melambatnya laju kendaraan. Mengingat rata-rata bentang jalan di wilayah Kota Denpasar yang pendek dan dengan lebar yang tidak sepadan dengan volume kendaraan, mengakibatkan kemacetan di satu ruas jalan berdampak pada ruas jalan yang lainnya. Terkait dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan upaya-upaya pemeliharaan jalan guna mengurangi pelambatan laju kendaraan dan melakukan peningkatan jalan khususnya jalan tembus jalan alternatif untuk memecah arus lalu lintas dengan maksud untuk mengurangi kemacetan pada satu titik ruas jalan yang dapat berdampak kemacetan pada ruas jalan yang lain.

Penanganan daerah rawan genangan/banjir dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah genangan yang cukup tinggi dan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya dampak bagi kelancaran transportasi, kesehatan lingkungan dan fasilitas permukiman masyarakat. Titik daerah rawan genangan di Kota Denpasar selalu berubah seiring dengan berkembangnya daerah pemukiman masyarakat dan adanya pengalihan fungsi lahan. Namun demikian Pemerintah Kota Denpasar mengupayakan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah meningkatnya daerah rawan genangan/banjir guna mencegah sebaran dampak genangan/banjir. Keterbatasan dana mengharuskan memilih

prioritas dalam penanganannya. Tahun 2019 ditargetkan adanya pengurangan 2 lokasi genangan dan dapat direalisasikan semuanya yang berarti tingkat pencapaiannya sebesar 100%. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi jumlah titik genangan adalah pembuatan beberapa sodetan, rekonstruksi penampang basah saluran dan normalisasi saluran secara bertahap.

Rumah Tangga Terakses Sistem Jaringan Sanitasi ditargetkan Tahun 2018 adalah 44,86% tercapai 45,29% (dengan 84.293 SR dan penduduk yang terlayani sebanyak 421.649 Orang). Sedangkan Target Tahun 2019 adalah 44,90 tercapai 46,80% (dengan 86.250 SR dan penduduk yang terlayani 431.252 orang). Pencapaian ini disebabkan oleh pemasangan Jaringan DSDP yang dilakukan di Desa Pemogan dan sekitarnya pada Tahun 2018 sebanyak 1800 sambungan rumah dan Tahun 2019 sebanyak 75 sambungan rumah. Permasalahan sulitnya mencapai Sasaran kinerja sanitasi air limbah di Kota Denpasar disebabkan tiga faktor, yaitu :

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi Air Limbah Terpadu belum maksimal dengan kemampuan dana daerah untuk membangun infrastruktur yang sangat terbatas.
- Pembangunan IPAL Terpusat DSDP dan IPAL Komunal Sanimas belum optimal karena kendala lahan dan penolakan masyarakat.
- Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya sanitasi air limbah bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan masih sangat rendah. Karena kebiasaan masyarakat yang sudah nyaman dengan penampungan limbah menggunakan *septic tank* dan membuang limbah domestik rumah tangga ke sungai.

Upaya dan solusi jangka pendek selalu dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Denpasar dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya tetap mengusulkan dana APBN untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar dan prioritas nasional

ini. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IPAL Terpusat DSDP dan IPAL Komunal untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan tetap dilaksanakan setiap Tahun.

Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi ditargetkan Tahun 2018 adalah 47,64% tercapai 54,05% (dengan 100.597 SR dan penduduk yang terlayani sebanyak 502.989 Orang). Sedangkan Target Tahun 2019 adalah 47,84 tercapai 54,98% (dengan 103.538 SR dan penduduk yang terlayani 517.691 orang). Dinas PUPR selain memasang jaringan pipa distribusi, juga memasang sambungan rumah air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Permasalahan sulitnya mencapai Sasaran kinerja air bersih terlindungi di Kota Denpasar disebabkan tiga faktor, yaitu :

- Perilaku masyarakat Kota Denpasar yang masih menggunakan air bawah tanah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum belum maksimal karena kemampuan dana untuk membangun infrastruktur jaringan perpipaan yang kurang., dan
- Keterbatasan sumber air baku di Kota Denpasar yang hanya mengandalkan Sungai Ayung dan Layanan SABAGITA.

Upaya dan solusi jangka pendek selalu dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Denpasar dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya tetap mengusulkan dana APBN untuk Air Minum dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar dan prioritas nasional ini. Selain itu kerjasama yang intensif selalu dilakukan dengan Perumda Tirta Sewaka Dharma dalam membangun jaringan pipa distribusi, sambungan rumah dan pemenuhan kebutuhan air baku dari SPAM Petanu dan SPAM Penet demi tercapainya cakupan pelayanan air minum di Kota Denpasar.

Tujuan 3. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)

10) Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan.

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) dalam Tahun 2019 ditetapkan sasaran strategis yaitu, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif
dan Akuntabel

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 10 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL						
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,62	82	86,48	105,46
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100,00
18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	A	BB	90,01
			70,07	80,01	72,02	
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :					98,49

Dari Tabel 3.18 dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel realisasinya telah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 98,49% (Baik), jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Tahun 2018 sebesar 99,60% (Baik) maka mengalami penurunan sebesar 0,95. Penurunan ini disebabkan tidak tercapainya IKU Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditargetkan A (90,01), dimana capaian SAKIP Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2019 adalah dengan predikat BB dengan capaian 72,02.

Inovasi yang di lakukan dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel yaitu menciptakan *Sang Sewakadarma* agen perubahan reformasi birokrasi di

lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Budaya Kerja *Sewakadarma*. *Sewakadarma* adalah Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mengandung arti bahwa pengabdian dan pelayanan adalah kewajiban. Pemahaman ini diharapkan mampu merubah mindset aparatur bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat. *Sang Sewakadarma* memiliki peran dan tugas sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator dan penghubung yang dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Sejak dibangunnya inovasi *Sang Sewakadarma* pada Tahun 2018, Pemerintah Kota Denpasar melahirkan 10 orang agen perubahan yang di sebut dengan *Sang Sewakadarma* dengan kategori 4 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Mahotama, dan 6 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Utama. Di Tahun 2019, Pemerintah Kota Denpasar melahirkan 19 orang *Sang Sewakadarma*, dengan kategori 2 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Mahotama, 12 orang *Sang Sewakadarma* Utama, 4 orang *Sang Sewakadarma* Madya dan 1 orang kategori *Sang Sewakadarma* Pratama.

Terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dengan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu Kategori Kesehatan, Investasi, Kependudukan dan Kategori Perangkat Daerah Lainnya. Nilai rata-rata SKM Tahun 2019 adalah 86,48 dimana berdasarkan interval kepuasan masyarakat nilai tersebut masuk ke dalam kategori kinerja unit pelayanan baik (B).

Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2019 kembali menerima Penghargaan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 7 (tujuh) kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karena atas hasil pemeriksaan keuangan laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Kota

Denpasar telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2019 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kota Denpasar pada Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 72,02 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Denpasar sudah menunjukkan hasil yang baik. Untuk mencapai indikator sasaran yaitu meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kota Denpasar pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, Bappeda Kota Denpasar telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 15.08%. Hal ini dikarenakan capaian kinerja telah memenuhi target 100% dengan penyerapan anggarannya sebesar 84.92%. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana telah tertuang dalam rekomendasi dari Kementerian PAN & RB kepada Walikota Denpasar untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar ke depan.

Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 telah dilakukan dan sudah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2017. Didalam Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya didalam penyelarasan penjabaran indikator kinerja utama sampai ke

level eselon IV dilakukan perubahan mekanisme dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mana sebelum Forum Perangkat Daerah dilakukan dengan acara seremonial, sekarang dilakukan dengan presentasi masing-masing Kepala Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah memaparkan keselarasan IKU Daerah ke IKU Perangkat Daerah. Selain dari mengubah mekanisme perencanaan, juga telah dilaksanakan sosialisasi penyusunan LAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dengan mendatangkan narasumber baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Pemerintah Pusat.

Untuk mempertahankan serta meningkatkan nilai SAKIP, Pemerintah Kota Denpasar melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sehingga perencanaan kinerja dan indikator kinerja dapat berorientasi pada hasil (merapikan/membenahi pohon kinerja dan *cascade* PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- b. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU pada PD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan dengan prioritas untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan
- c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan penerapan manajemen kinerja dengan integrasi system perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2019, dilakukan juga produk inovasi antara lain :

1. POKIR (Pokok-Pokok Pikiran Dewan)



Gambar 3.8
Sistem e-Pokir

Pokir merupakan Pokok-Pokok Pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislative menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi ini kemudian akan ditindaklanjuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.

2. *Logical Framework* dan *Cascading*



Gambar 3.9
Sistem *Logical Framework* dan *Cascading*

Cascading memastikan Program Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program kegiatan ini pelaksanaannya dimonitoring kinerjanya untuk memantau perkembangan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Tujuan 4. Meningkatnya Ketahanan Ekonom Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan

11) Sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

Sebagai daerah perkotaan di Denpasar terdapat banyak perusahaan industri mulai dari home industri hingga industri dengan kapasitas besar yang melibatkan banyak tenaga kerja. Selama tiga Tahun terakhir, PDRB lapangan usaha industri terhadap PDRB Kota Denpasar terus mengalami peningkatan.

Pencapaian indikator persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB target Tahun 2019 sebesar 3,50 % dengan realisasi sebesar 8,34% tingkat capaian sebesar 151,17%. Artinya, persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kota Denpasar pada Tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pencapaian indikator persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB target Tahun 2019 sebesar 6,4% dengan realisasi sebesar 10,03% tingkat capaian sebesar 150,31%. Capaian indikator persentase pertumbuhan sektor perdagangan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pencapaian indikator persentase jumlah peningkatan nilai ekspor Kota Denpasar target Tahun 2019 adalah sebesar Rp.556.112.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.711.21.213.935,00 tingkat capaian sebesar 308%. Capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan dimana jumlah

peningkatan nilai ekspor yang mengalami peningkatan cukup tinggi adalah dari hasil kerajinan, hasil pertanian dan hasil lain-lain yang memberikan kontribusi cukup besar pada peningkatan nilai ekspor kota Denpasar. Capaian Sasaran Strategis Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11
Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 11 : BERKEMBANGNYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN						
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	8,35	3,50	8,34	238,29
		Milyar Rupiah	3.192	2.288	3.459	
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	9,69	6,40	10,03	155,72
		Milyar Rupiah	4.377	3.515	5.283	
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :					197,50

Berdasarkan Tabel 3.19 dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan realisasinya telah mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 197,50% (Baik Sekali). Bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 yang sebesar 101,53%, maka rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 95,98%.

Dalam rangka pencapaian sasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan beberapa inovasi :

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dengan indikator persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB didukung dengan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi dan Tertib Niaga dimana rata-rata capaian kinerjanya mencapai 100 %.Pelatihan kemasan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan industri pembuatan dupa, pelatihan menjahit, pelatihan penerapan GKM, pelatihan industri animasi, pelatihan teknologi industri dan komunikasi, pelatihan perbengkelan roda dua (motor custom), pelatihan pengolahan pangan
2. Pertumbuhan sektor perdagangan dengan indikator persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB didukung dengan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi dan Tertib Niaga dimana rata-rata capaian kinerjanya mencapai 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah Pelatihan sekolah pasar, sekolah anak pedagang pasar, lomba cerdas kreatif, pelaksanaan pasar murah, pemilihan Duta Endek, pelaksanaan Denpasar Festival, Denpasar fasion festival, revitalisasi pasar.

13) Sasaran Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bernaung dibawah Desa Pakraman memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi di pedesaan. Keuntungan LPD digunakan untuk membangun kehidupan religius warga berikut kegiatan upacaranya. Pemerintah Kota Denpasar melakukan pembinaan

untuk mendorong agar seluruh LPD memiliki likuiditas yang baik sehingga masuk dalam katagori sehat.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 12 : MENINGATNYA KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA						
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	97,14	100,00	85,71	85,71
			34	35	30	
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :					85,71

Berdasarkan Tabel 3.20 dapat diketahui bahwa indikator sasaran Lembaga Perkreditan Desa Sehat realisasinya belum mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 85,71% (Baik) mengalami penurunan sebesar 11,43%, jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang sebesar 97,14%.

Setiap Desa Pakraman di Kota Denpasar memiliki LPD sehingga LPD di Kota Denpasar berjumlah 35 unit. Sampai dengan Tahun 2019, capaian LPD yang termasuk dalam kategori sehat sebanyak 30 LPD, sebanyak 1 LPD kategori cukup sehat, sebanyak 1 LPD dalam kategori kurang sehat dan sebanyak 3 LPD dengan kategori tidak sehat.

Adanya permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan antara lain : Kurang profesionalnya pengelola LPD serta kurang sempurnanya sistem administrasi LPD, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi diarahkan kepada upaya-

upaya sehingga pengelola LPD memiliki kemampuan menginovatifkan kinerja efisiensi dan daya saing, melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan senantiasa memberdayakan karyawan, tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD, memiliki komitmen dan konsistensi pengembangan usaha serta bukan sekedar memenuhi tuntutan profitable secara komersial akan tetapi juga memiliki pertanggungjawaban sosial.

Mencermati keberadaan LPD tersebut diatas, untuk itu upaya pengembangan LPD semakin relevan diangkat ke tataran strategi mengingat perubahan-perubahan menyangkut lingkungan bisnis yang mengharuskan pengelola LPD melakukan perubahan persepsi, visi bisnis maupun perilaku bisnisnya.

13) Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil dimaksudkan sebagai upaya membangun dengan sasaran masyarakat kecil melalui pendekatan ekonomi. Hal ini dilakukan agar masyarakat kecil memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga secara ekonomi akan bergerak menjauh dari garis kemiskinan dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan di Kota Denpasar.

Sangat disadari selama ini masyarakat kecil memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan usaha akibat minimnya agunan yang dimiliki untuk mengakses permodalan. Kecilnya permodalan berkaitan erat dengan besaran skala usaha yang dilakukan. Atas dasar pemahan tersebut, penerbitan ijin SIUP Kecil dapat dikaitkan dengan aktifitas peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan.

Koperasi dan UMKM merupakan bagian penting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan bagian terbesar rakyat Bali khususnya masyarakat di Kota Denpasar. Ini mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh keberadaannya sejumlah 30.678 usaha mikro, 1.050 Usaha kecil dan 298 Usaha menengah sampai dengan Tahun 2019 dengan kegiatan usaha mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar diseluruh Kecamatan di Kota Denpasar. Oleh karena itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin.

Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UMKM terutama kredit investasi. Untuk menentukan strategi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal.

Strategi dan Kebijakan strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM dengan cara :

- (1) Mengembangkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi
- (2) Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan UMKM

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 13 : MENINGKATNYA PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL						
22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50	0,50	0,50	100,00
		Jml UM	300	450	450	
23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	63,00	66,00	66,00	100,00
		Koperasi	661	692	692	
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :					100,00

Berdasarkan Tabel 3.21, dapat diketahui bahwa indikator sasaran Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil realisasinya telah mencapai target dan indikator sasaran Koperasi yang SHU-nya meningkat realisasinya melampaui target. Rata-rata capaiannya sebesar 100% (Baik) sama seperti capaian pada Tahun 2018.

Pada indikator Persentase usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 0,50 % atau sebesar 0,50% (150 Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha Kecil), dalam hal pencapaian Persentase usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil, dilakukan dengan melakukan pembinaan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk

mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha Mikro selain difokuskan dalam hal untuk peningkatan kuantitas produk juga dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDM bagi UMKM tersebut. Pembinaan dilakukan selain dengan turun kelapangan juga Pelaku UMKM di berikan Pelatihan – pelatihan juga sosialisasi tentang kelembagaan UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan serta peningkatan kuantitas produk sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan, secara tidak langsung akan meningkat perekonomian dari pelaku UMKM maupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.



Gambar 3.10

Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar saat membuka Pelatihan Kewirausahaan

2. Penyediaan Informasi Pasar
Perkembangan UMKM membutuhkan adanya jaringan kemitraan antar lembaga sehingga akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil UMKM cepat bisa diketahui. Membangun kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar akan mendorong tumbuh dan berkembangnya

usaha UMKM. Pengusaha besar mempunyai kewajiban untuk menjadi mitra bagi para pelaku UMKM. Tumbuhnya wira usaha muda/baru diberbagai sektor diharapkan mampu menumbuhkan UMKM. Menumbuhkan jiwa wirausaha dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat mempunyai nilai strategis dalam menghadapi dunia usaha. Wirausaha dibidang UMKM akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah. Dalam hal terbatasnya akses permodalan. Terlebih lagi pelaku usaha UMKM di sektor informal, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya. Dimana Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memfasilitasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku UMKM. Dalam pemasaran produk hasil UMKM dilakukan baik dalam ajang Lokal maupun Nasional. Untuk lebih meningkatkan informasi pasar bagi UMKM telah dilakukan dengan berbagai langkah antara lain :

- a. Peningkatan Kemitraan. Kemitraan yang dilaksanakan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi maupun penjualan, dimana dalam hal untuk memenuhi bahan baku produksi atau pun melakukan hubungan kerjasama saling bertukar produk yang dihasilkan. Dengan harapan dapat meningkatkan penjualan ataupun menekan biaya produksi secara signifikan dari bahan baku yang diperolehnya.

- b. Pameran Dalam maupun Luar Daerah, dalam rangka lebih memperkenalkan produk UMKM yang dihasilkan dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM binaan dalam ajang promosi baik di dalam Pameran tingkat lokal juga dilaksanakan dalam ajang nasional. Dengan tujuan lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan, dimana agar para UMKM lebih meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan lebih dapat dikenal oleh masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional. Dimana setiap ajang promosi yang dilaksanakan selalu berusaha untuk mengundang para pihak Perbankan ataupun Pengusaha besar dengan harapan agar nantinya dapat melihat dari pada potensi dari produk UMKM.



Gambar 3.11

Fasilitasi dengan mengikutsertakan UMKM Kota Denpasar pada Pameran UMKM di Luar Daerah

Pada indikator Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat mencapai realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 66 % atau 693 unit koperasi atau apabila dilihat dari data keragaan koperasi se-Kota Denpasar dapat dilihat pencapaian SHU koperasi secara keseluruhan sebesar Rp. 96.908.650.100,00 atau 5,23%.

Dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp. 91.840.489.590,00 atau dalam hal ini dimana SHU ini merupakan pendapatan atau keuntungan Koperasi yang diperoleh dalam satu Tahun setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam Tahun buku yang bersangkutan, yang mana keuntungan atau laba bersih yang diperoleh oleh koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk pencapaian persentase koperasi yang SHU nya meningkat, dilakukan dengan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan, Di dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pengelola koperasi, pembinaan dilakukan baik dari sisi kelembagaan atau pun dari SDM pengelola koperasi yang dilakukan dengan langsung ke koperasi ataupun dengan mengikuti sertakan para pengelola koperasi melalui Pendidikan atau Bimtek – Bimtek yang berkaitan langsung dengan pengetahuan tata cara pengelolaan koperasi yang sesuai dengan jati diri. sehingga dapat diketahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.



Gambar 3.12

Pembinaan Usaha kepada salah satu koperasi

2. Pengawasan, untuk meningkatkan kinerja koperasi pengawasan sangatlah penting dilaksanakan dimana akan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi dan akan meningkatkan perekonomian daerah, dimana akan mengurangi resiko dari investasi ilegal yang merugikan masyarakat dimana mengatasnamakan koperasi. Pengawasan berkelanjutan bertujuan agar koperasi tidak keluar dari koridor jati diri koperasi.



Gambar 3.13
Pelaksanaan Monitoring Perkuatan Permodalan
Bagi Koperasi

3. Penyediaan Informasi pasar, untuk menghadapi permasalahan terbatasnya akses permodalan. Dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku Koperasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku koperasi. Dimana Dinas Koperasi turun secara langsung ke Koperasi menyampaikan informasi Permodalan agar dimana koperasi

yang membutuhkan permodalan dapat mengajukan lewat KUR maupun ke LPDB-Kemenkop UKMRI.



Gambar 3.14

Kepala Dinas Koperasi saat melihat stand pameran koperasi yang ikut serta dalam rangkaian Pameran Harkopnas di Purwokerto

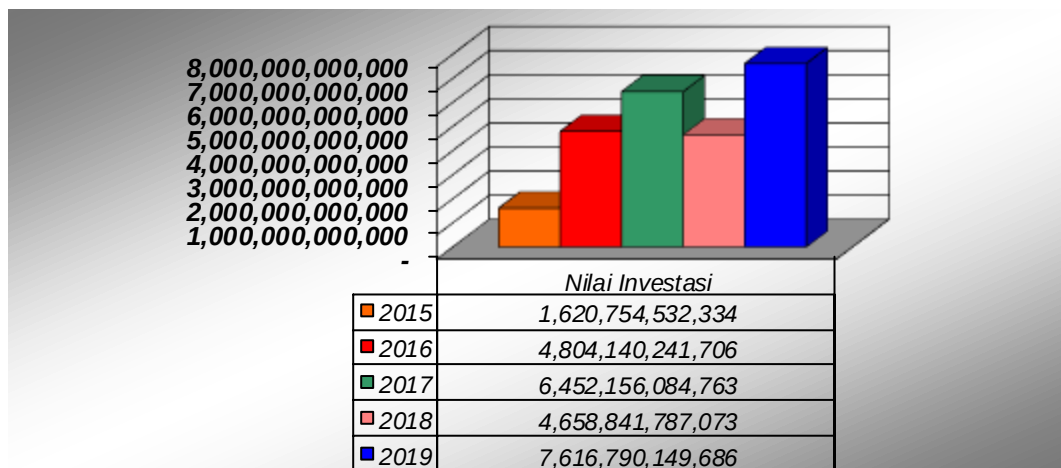
14) Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Arah Kebijakan Strategis Bidang Investasi di Kota Denpasar diarahkan pada penyederhanaan terhadap perijinan dan meningkatkan kualitas laju perijinan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Meningkatnya Nilai Investasi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 14 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI						
24	Investasi yang tercatat di PTSP	Persen	4.659	5.174	7.617	147,23
		Rupiah (Dalam Milyar)	-27,79	2,50	63,49	2539,60
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :					147,23

Berdasarkan Tabel 3.22 dapat diketahui bahwa indikator sasaran Investasi Yang Tercatat pada PTSP capaiannya sebesar 147,23% (Baik sekali). Pada capaian IKU persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar dari Tahun dari tahun 2015 S/d 2018 mengalami fluktuasi dan tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 63,49 % dari tahun 2018. Adapun jumlah investasi tahun 2014 sebesar Rp.1.369.009.228.295, tahun 2015 sebesar Rp. 1.620.754.532.334, tahun 2016 sebesar Rp.4.804.140.241.706, tahun 2017 sebesar Rp.6.452.156.084.763, tahun 2018 sebesar Rp.4.658.841.787.073 dan tahun 2019 sebesar Rp.7.616.790.149.686.



Gambar 3.15
Jumlah Investasi di Kota Denpasar
Tahun 2015-2019

15) Sasaran Meningkatnya Pariwisata Berbasis Budaya

Sebagai ibukota Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi, dan didukung berbagai fasilitas wisata yang lengkap sehingga membuat liburan para wisatawan menjadi menyenangkan. Kota Denpasar merupakan kota di Pulau Bali yang memiliki pertumbuhan industri pariwisata yang baik. Kota Denpasar juga menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali.

Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya mendorong pengembangan kepariwisataan di Kota Denpasar, yang tidak terlepas dari arah dan kebijaksanaan kepariwisataan Provinsi Bali yang mengembangkan pariwisata budaya dengan didukung budaya Bali yang bernafaskan agama Hindu. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan bentuk pelayanan yaitu akomodasi, transportasi dan jasa-jasa lainnya. Langkah-langkah terarah dan

terpadu tersebut terus ditingkatkan untuk mendukung kepariwisataan. Diharapkan upaya pembangunan dilakukan dapat mendukung perkembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Arah Kebijakan Strategis Bidang Pariwisata di Kota Denpasar diarahkan pada :

- (1) Mengembangkan pariwisata budaya berwawasan lingkungan yang dijiwai agama Hindu dengan mengembangkan obyek, daya tarik wisata, dan atraksi wisata, pembinaan dan peningkatan kesadaran peran aktif masyarakat termasuk desa adat.
- (2) Mengembangkan fasilitas pengelolaan industri kepariwisataan dengan mengembangkan koordiansi dengan pihak-pihak komponen pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga mampu memberdayakan perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian kerakyatan.
- (3) Mengembangkan pengelolaan kepariwisataan melalui teknologi informasi.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 15 : Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya						
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	594.539	605.066	709.536	117,27
26	Lama Tinggal Wisatawan					
	- Asing	Hari	3,13	3,14	3,14	100,00
	- Domestik	Hari	3,10	3,11	3,11	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI
SASARAN 15 : Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya						
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Rupiah (Dalam Jutaan)	327.251,39	291.899,08	382.841,74	131,16
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :					112,11

Berdasarkan Tabel 3.23, dapat diketahui bahwa indikator sasaran meningkatnya pariwisata berbasis budaya realisasi rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2019 adalah sebesar 112,11% (Baik Sekali). Capaian ini meningkat sebesar 8,11% jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 yang sebesar 104% (Baik Sekali). Dari tabel di atas juga dapat disimpulkan bahwa melihat hasil Kinerja sesuai dengan indikator yang dibuat untuk Kinerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar dengan menggunakan ukuran Skala Nilai Reliasasi Kinerja, ketiga indikator telah memenuhi target yang diharapkan dimana Indikator Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar capaiannya 117,27%, Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan yang menginap di Kota Denpasar capaiannya 100% dan Meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan capaiannya 131,16%.

Pengembangan kepariwisataan di Kota Denpasar terus diupayakan karena sektor ini merupakan salah satu tulang punggung (*leading sector*) bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya di Kota Denpasar. Pengembangannya mengarah pada pengembangan pariwisata budaya sejalan dengan Visi “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi baik hotel bintang maupun non bintang (menginap di hotel/penginapan) pada Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018. Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Denpasar Tahun 2019 sebesar 709.536 orang dan target berdasarkan RPJMD pada Tahun 2019 sebesar 605.066 orang. Ini berarti terjadi peningkatan pencapaian sebesar 117% untuk jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan dengan Tahun 2018.

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar adalah makin beragamnya daya tarik wisata baru di Kota Denpasar dan kecendrungan meningkatnya wisatawan minat khusus yang lebih tertarik terhadap pengetahuan dan pengalaman selain tujuan bersenang senang. Wisatawan jenis ini lebih tertarik terhadap daya tarik wisata budaya dimana potensi ini menjadi peluang bagi Kota Denpasar yang memiliki beragam daya tarik wisata budaya baik Pura, Puri, Pasar, Pantai dan Museum serta kehidupan tradisi. Pelaksanaan pariwisata Kota Denpasar dilakukan dengan cara menyelenggarakan pameran serta promosi dan menggunakan TI (<http://pariwisata.denpasar.id>) dan <http://denpasartourism.com>) dapat memberikan hasil positif bagi pertumbuhan wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar. Kaitannya dengan program pemasaran, Dinas Pariwisata telah memperluas jaringan pemasarannya tidak hanya memberikan informasi pariwisata Kota Denpasar melalui pameran pariwisata, namun melakukan kerjasama antar daerah tujuan wisata, gathering pariwisata, Table Top dan sales mission ke negara yang berpotensi memberikan kontribusi untuk peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar. Kegiatan ini merupakan sinergitas antar Pemerintah dan para pelaku pariwisata di Kota Denpasar untuk memfasilitasi pelaku usaha pariwisata baik usaha akomodasi, Travel Agent, daya tarik wisata

dan usaha wisata lainnya dalam memperluas jangkauan promosi produknya yang turut mendukung peningkatan pencapaian indikator ini. Untuk Sales Mission negara yang dikunjungi adalah German, London dan India. Untuk *Table Top* dilaksanakan di Kota Surabaya, pameran pariwisata di Yogyakarta dan kerjasama promosi pariwisata dilakukan bekerjasama dengan Kota Bandung dan Kota Surakarta.



SALES MISSION



TABLE TOP



GATHERING



PAMERAN

Gambar 3.16

Kegiatan Pameran Pariwisata Kota Denpasar

Selanjutnya Rata-rata lama tinggal wisatawan yang menginap di Kota Denpasar berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengembangan pariwisata di Kota Denpasar. Dengan lama tinggal wisatawan yang lebih panjang, diharapkan akan memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk lebih banyak menikmati beragam daya tarik wisata Kota Denpasar, berbelanja atau membeli produk/jasa pendukung yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat dari sektor riil. Untuk itu rata-

rata lama tinggal wisatawan yang menginap di Kota Denpasar menjadi variabel penting untuk mengukur kinerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

Untuk Tahun 2019 Rata-rata lama wisatawan menginap di Kota Denpasar masih tetap memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sektor pariwisata di Kota Denpasar. Persentase pencapaian sudah mencapai 100 % dari target yang diharapkan, walaupun belum terjadi peningkatan. Rata-rata lama wisatawan menginap di Kota Denpasar pada Tahun 2019, untuk wisatawan asing sebesar 3.14 hari dan domestik sebesar 3.11 hari dan capaian ini sudah sesuai dengan target kinerja yang diharapkan pada RPJMD. Capaian Tahun 2019 ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2018, dimana untuk lama wisatawan asing selama 3,13 hari dan untuk domestik selama 3,10 hari.

Salah satu strategi yang telah dilakukan dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan dengan memotivasi dan memfasilitasi kalangan swasta dan komunitas kreatif agar lebih berperan aktif dalam membuat terobosan baru, khususnya mengemas beragam sumber daya pariwisata sehingga wisatawan akan lebih tertarik dan lebih lama lagi tinggal di Kota Denpasar. Beragam daya tarik wisata baik daya tarik wisata alam seperti DTW Tukad Bindu, Subak sembung dan beragam even tradisi seperti Lomba Layang-Layang Tradisional dan Denpasar Festival terus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai upaya agar wisatawan lebih tertarik dan lebih lama tinggal di Kota Denpasar.

Selain untuk berlibur, wisatawan nusantara dan mancanegara memiliki kecenderungan datang ke Kota Denpasar untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan mengunjungi daya tarik wisata budaya terutama pusaka budaya (*heritage cultural*) selain alam serta berinteraksi langsung dengan kehidupan tradisi masyarakat. Untuk merespon hal tersebut Dinas

Pariwisata Kota Denpasar bersama dengan *stakeholder* pariwisata berupaya untuk mengembangkan dan mengemas beragam atraksi wisata, mengembangkan event pariwisata dengan lebih kreatif dan inovatif agar lebih menarik untuk wisatawan dengan tetap mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat (*CBT*) dan pengembangan pariwisata budaya berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Dengan meningkatnya lama tinggal wisatawan di Kota Denpasar, diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan. Berdasarkan capaian Tahun 2019 realisasi penerimaan pada sektor hotel, restoran dan hiburan adalah sebesar Rp.382.841.746.997,54 atau sebesar 131,16%. Capaian ini meningkat sebesar 18,16% dari Tahun 2018 yang realisasinya Rp.327.251.396.690,31 atau sebesar 113%.



Gambar 3.17

Daya Tarik Wisata Budaya Yang Menjadi Primadona Untuk Menarik Kunjungan Wisatawan Ke Kota Denpasar

Tujuan 5. Memperkuat keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa

16) Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mendorong kesadaran masyarakat Kota Denpasar guna peduli terhadap lingkungan hidupnya. Dalam upaya untuk pelestarian lingkungan hidup di Kota Denpasar, seluruh komponen masyarakat, pemerintah, pengusaha, serta sekolah wajib untuk berperan aktif karena kita perlu sadari bahwa lingkungan merupakan tempat manusia tinggal dan memperoleh penghidupan. Selain itu, Bali yang terkenal dengan wisata alamnya, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan agar para wisatawan nyaman saat berkunjung ke Bali dan masyarakatpun nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali mempunyai permasalahan yang kompleksitas termasuk masalah sampah, dimana sampai saat ini Kota Denpasar belum dapat secara maksimal dalam mengelola manajemen persampahan disamping masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya.

Disadari atau tidak sebenarnya sampah merupakan bagian dari keseharian kita. Setiap aktivitas manusia, pasti menghasilkan buangan sampah. Persoalan seperti ini, tidak dapat dibiarkan begitu saja, kita harus bersikap untuk mengupayakan pengelolaan dan pemilihan sampah mulai dari tingkat rumah tangga.

Tabel 3.24

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	REALISASI %
SASARAN 16 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
28	Sampah tereduksi	Persen	22,32	26,00	26,00	100,00
29	Indeks LH	Indeks	51,22	53,63	55,24	103,00
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :					101,50

Berdasarkan Tabel 3.24, dapat diketahui bahwa indikator sasaran Sampah Tereduksi telah mencapai target dan indikator sasaran indeks Lingkungan Hidup baru mulai dihitung Tahun 2018 dengan hasil 51,22. Rata-rata capaiannya sebesar 101,22% (Baik Sekali). Sedangkan di Tahun 2019 Indeks Lingkungan Hidup sebesar 55,24. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai IKLH di Kota Denpasar Tahun 2018 yang mencapai 51,22. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kota Denpasar pada Tahun 2019 jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Persentase volume sampah yang tereduksi di Kota Denpasar Tahun 2019 meningkat dibandingkan Tahun 2018 yang hanya sebesar 22,32%. Peningkatan capaian kinerja ini didukung oleh keberhasilan dalam pelaksanaan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Pada Tahun 2019, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Denpasar yaitu sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, upaya 3R (*reduce, reuse, recycle*), pembentukan bank sampah, komposting, dan penyusunan peraturan terkait dengan pengelolaan persampahan, termasuk penerbitan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Penetapan Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah.

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian pelaksanaan sasaran meningkatnya pengelolaan sampah di Kota Denpasar Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA Suwung dilakukan dengan menggunakan 98 unit *dump truck*, 20 unit *armroll truck* dan 51 unit *container* sampah.
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan diwujudkan melalui pembentukan bank sampah. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*) sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya

ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Untuk Tahun 2019, jumlah bank sampah yang ada di Kota Denpasar sebanyak 128 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017 dan 2018 dimana jumlah bank sampah Tahun 2017 sebanyak 78 unit pada Tahun 2018 dan 69 unit pada Tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah telah meningkat sehingga kedepan diharapkan jumlah sampah yang dibawa ke TPA dapat dikurangi.



Gambar 3.18

Antusiasme Siswa-siswa Sekolah dalam Menabung Sampah di Bank Sampah

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pemecahan masalah sampah di Kota Denpasar dapat tercapai antara lain dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat Kota Denpasar dalam upaya pengelolaan sampah. Pengelolaan dimaksud dimulai dari tingkat rumah tangga dapat dilakukan dengan cara merubah perilaku masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi. Dalam upaya bersosialisasi kepada masyarakat inilah dibentuk tenaga juru pantau lingkungan (JUMALI). Juru Pantau Lingkungan (JUMALI) saat ini berjumlah 50 orang, JUMALI berperan penting sebagai mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/permasyarakat tata kelola persampahan, memonitoring/mengidentifikasi sumber

sampah, melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, berperan sebagai penggerak dan pengawasan terhadap masyarakat dalam pengumpulan dan pemilahan sampah. Adapun pada Tahun 2019 jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi kebersihan dari petugas Jumali sejumlah 13.500 orang.

4. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan persampahan Kota Denpasar, maka diperlukan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan seperti alat-alat kerja, bahan bakar minyak, pemeliharaan armada kebersihan, penggantian suku cadang, dan pemeliharaan depo. Pada Tahun 2019 terdapat 10 unit pemeliharaan depo.

5. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan (*Composting*)

Pada kegiatan ini dilaksanakan upaya composting yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Berdasarkan perhitungan, dengan asumsi 1 orang perhari menghasilkan 4 liter sampah dengan jumlah penduduk 914.100 jiwa dan prediksi peningkatan volume sampah pada saat hari besar seperti Galungan, Kuningan, Nyepi kurang lebih 60% serta 10% peningkatan sampah ceremonial/kegiatan lainnya, maka produksi sampah Kota Denpasar perTahun sebesar = $1.432.760 \text{ m}^3/\text{Tahun}$. Sedangkan volume sampah yang diangkut ke TPA sebesar = $969.231 \text{ m}^3/\text{Tahun}$, sehingga sisa sampah Kota Denpasar sebesar $463.529 \text{ m}^3/\text{Tahun}$. Dari nilai sisa sampah tersebut, 80% merupakan volume sampah yang tereduksi yaitu sebesar $370.823 \text{ m}^3/\text{Tahun}$ atau sebesar 26%. Adapun Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Indeks LH Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	45	49,68	110,4%
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	86	85,014	98,85%
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	32	37,11	115,97%
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
	Indek Kualitas LH		49,20	51,22	104,11%

Berdasarkan Tabel 3.25, diketahui bahwa pada Tahun 2018, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari komponen Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Lahan dari target 49,20 tercapai 51,22 (104,11%). Pencapaian Sasaran didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa :

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan;
2. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

Inovasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan persampahan di Kota Denpasar adalah dengan membangun aplikasi SiDarling (Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengumpulkan sampah anorganik yang dihasilkannya ke bank sampah terdekat, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan bank sampah di Kota Denpasar, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengetahui

informasi tentang bank sampah, baik lokasi, keanggotaan, profil masing-masing bank sampah, sampai informasi saldo nasabah bank sampah. Sehingga dapat dikatakan aplikasi ini merupakan jembatan yang menghubungkan bank sampah dengan nasabahnya. Aplikasi tersebut juga menyediakan reward bagi nasabah yang telah mengumpulkan point dalam jumlah tertentu. Sampai Sampai dengan bulan Desember 2019, jumlah bank sampah yang sudah tergabung dalam aplikasi SiDarling yaitu sebanyak 110 (seratus sepuluh) bank sampah. Dari 110 Bank Sampah terdapat 15.031 nasabah yang memiliki rekening aktif, dengan jumlah saldo tabungan tertentu setiap rekening. Penyedia *reward* dari pihak swasta yang sudah bekerjasama dalam aplikasi ini diketahui sebanyak 46 (empat puluh enam) usaha, sedangkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang telah bekerjasama memberikan *reward* dalam aplikasi ini sebanyak enam instansi.



Gambar 3.19

***Launching Aplikasi SiDarling oleh Ibu Siti Nurbaya Bakar
(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)***

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Denpasar dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 1.291.746.685.338,70 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.143.940.569.369,65 atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,56%. Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019, komposisi belanja APBD Kota Denpasar dan realisasinya seperti Tabel 3.26.

Tabel 3.26
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2019		
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	1.195.547.910.202,79	1.111.372.216.460,72	92,96
2	Belanja Langsung	1.291.746.685.338,70	1.143.940.569.369,65	88,56
	Jumlah	2.487.294.595.541,49	2.255.312.785.830,37	90,67

Sumber : BPKAD Kota Denpasar, 2019

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 48,07% dari realisasi belanja Kota Denpasar di Tahun 2019 dan sisanya sebesar 51,93% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja

RPJMD Kota Denpasar yang diperjanjikan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 702.605.085.228,73. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 620.016.717.598,02 atau 88,25%, dapat dilihat pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar
Per Sasaran Strategis Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	5.144.173.332,31	4.521.595.645,00	87,9
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	36.249.684.004,00	34.575.351.621,00	95,38
3	Mengentaskan Kemiskinan	2.170.262.747,00	2.002.972.691,00	92,29
4	Mengurangi pengangguran	2.512.080.000,00	2.156.502.350,00	85,85
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	233.443.608.763,08	207.652.748.771,93	88,95
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	143.935.498.941,29	129.773.016.519,34	90,16
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	9.230.441.520,00	8.665.253.155,00	93,88
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	5.158.153.563,00	4.231.798.069,00	82,04

9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	110.335.138.632,05	89.542.816.338,69	81,16
10	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	21.076.713.829,00	19.984.672.524,00	94,82
11	Berkembangnya industri Pengolahan dan Perdagangan	10.782.009.746,00	9.566.266.642,00	88,72
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	5.580.003.950,00	4.695.807.994,00	84,15
13	Meningkatnya perkembangan Ekonomi Masyarakat kecil	26.476.261.078,00	23.092.612.370,00	87,22
14	Meningkatnya nilai investasi	6.771.136.250,00	5.715.776.102,00	84,41
15	Meningkatkan pariwisata berbaris budaya	12.950.277.922,00	11.046.757.235,00	85,3
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	53.420.727.536,00	46.298.929.837,00	86,67
	Jumlah	685.236.171.813,73	603.522.877.864,96	88,08

Sumber : LRA Kota Denpasar 2019 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.27 diatas dapat diketahui persentase realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar 88,08%, meningkat sebesar 6,86% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2018 yang sebesar 81,22%. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Denpasar, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada Tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.28.

Tabel 3.28
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kota Denpasar

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
MISI 1					
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	2	101,32	4.521.595.645,00	87,90
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1	Belum Ada Nilai	34.575.351.621,00	95,38
MISI 2					
3	Mengentaskan Kemiskinan	1	98,55	2.002.972.691,00	92,29
4	Mengurangi Pengangguran	1	133,73	2.156.502.350,00	85,85
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	101,76	207.652.748.771,93	88,95
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1	103,10	129.773.016.519,34	90,16
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	3	113,5	8.665.253.155,00	93,88
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	115,39	4.231.798.069,00	82,04
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	127,11	89.542.816.338,69	81,16
MISI 3					
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	3	98,49	19.984.672.524,00	94,82
MISI 4					
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	197,50	9.566.266.642,00	88,72
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	1	85,71	4.695.807.994,00	84,15
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	2	100	23.092.612.370,00	87,22
14	Meningkatnya nilai investasi	1	147,23	5.715.776.102,00	84,41
15	Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya	3	112,11	11.046.757.235,00	85,30
MISI 5					
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	101,50	46.298.929.837,00	86,67

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2019 (Data diolah)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Denpasar.

D. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam Tabel 3.28 terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dari 16 (enam belas) sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100.00% yaitu sebanyak 11 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.29
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
MISI 1					
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	2	101,32	87,90	13,42
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1	Belum Ada Nilai	95,38	Belum Ada Nilai
MISI 2					
3	Mengentaskan Kemiskinan	1	98,55	92,29	6,26
4	Mengurangi Pengangguran	1	133,73	85,85	47,88

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	101,76	88,95	12,81
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1	103,10	90,16	12,94
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	3	113,50	93,88	19,62
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	115,39	82,04	33,35
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	127,11	81,16	45,95
MISI 3					
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	3	98,49	94,82	3,67
MISI 4					
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	197,50	88,72	108,78
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	1	85,71	84,15	1,56
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	2	100	87,22	12,78
14	Meningkatnya nilai investasi	1	147,23	84,41	62,82
15	Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya	3	112,11	85,30	26,81
MISI 5					
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	101,50	86,67	14,83

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.29, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran sudah efisien. Dari ke 16 (enam belas) sasaran tersebut diatas, masih terdapat sasaran yang belum dapat dihitung tingkat efisiensinya yaitu, sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya, yang diukur menggunakan Indeks Kebudayaan, yang sampai saat ini belum ada data publish terkait indeks kebudayaan untuk kabupaten/kota. Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel menjadi sasaran yang terendah tingkat efisiensinya yaitu sebesar 1,56% dan yang tertinggi adalah sasaran berkembangnya industri pengolahan dan perdagangan dengan tingkat efisiensi sebesar 108,78%. Pencapaian tingkat efisiensi anggaran pada sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan sangat didukung oleh posisi Kota Denpasar sebagai pusat perekonomian di Provinsi Bali.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019. LKjIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar yang telah ditetapkan pada Tahun 2019, sebagai berikut :

- 18 indikator atau 62,07% kategori Baik Sekali dan melampaui target.
- 10 indikator atau 34,48% kategori Baik, dan
- 1 indikator atau 3,45% data belum tersedia.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja Tahun ketiga yang tercantum dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dan khususnya untuk Tahun 2019 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Denpasar Tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan diupayakan untuk dipenuhi dalam sisa waktu RPJMD sampai Tahun 2021 dengan memprioritas program/kegiatan yang mendukung pencapaian target Kinerja dari indikator yang belum tercapai. Adapun 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori Baik tetapi belum mencapai target, maka diupayakan beberapa langkah kedepan yang kiranya dapat diambil antara lain adalah :

1. Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan

Dimana dari target sasaran seluas 2.351 ha pada Tahun 2019 hanya terealisasi 1.158 ha. Adapun langkah kongkrit kedepan yang dapat dilaksanakan adalah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan di Kota Denpasar. Upaya utama yang dilakukan adalah membangun sinergitas antar Perangkat Daerah terutama di bidang Perizinan, Pertanian, Kebudayaan serta Ketrentaman dan Ketertiban Umum termasuk Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai Lingkungan/Dusun.

2. Angka Kemiskinan

Langkah kongkrit kedepan yang sekiranya dapat dilaksanakan dalam upaya pencapaian atas target sasaran mengentaskan kemiskinan adalah optimalisasi pelaksanaan Kota Tangguh Sosial dengan penguatan basis data (*database*) penduduk miskin sampai ke penyebab terjadinya kemiskinan serta sinergitas Perangkat Daerah yang terlibat dalam Kota Tangguh Sosial.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Langkah kongkrit kedepan yang dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pemilihan umum

4. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2018 bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kota Denpasar adalah 72,02 dengan predikat BB, sedangkan pada target RPJMD adalah predikat A dengan kategori minimal (80,01). Langkah kongkrit kedepan yang dilakukan adalah menyempurnakan proses penjenjangan (*cascading*) kinerja untuk dijadikan dasar dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan, memastikan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai berorientasi hasil, memastikan diterapkannya anggaran berbasis kinerja di seluruh Perangkat Daerah, melakukan identifikasi *crosscutting* untuk mencapai program prioritas daerah yang relevan dengan permasalahan dan melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, serta meningkatkan kualitas evaluasi program dengan cara memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan Kota Denpasar.

5. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sehat

Langkah kongkrit kedepan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah optimalisasi pembinaan terhadap 35 (tiga puluh lima) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terutama yang di Tahun 2019 ini dalam kondisi cukup sehat (1 LPD), kurang sehat (1 LPD) dan tidak sehat (3 LPD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder sataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Denpasar.



Denpasar, 31 Maret 2020

Walikota Denpasar,

PAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/201M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar;
3. Walikota adalah Walikota Denpasar;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar;
5. Tujuan adalah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat

yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
9. Keluaran *output* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
11. Indikator Kinerja Utama *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Pendahuluan dan IKU di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini :

- a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar diberikan tugas untuk mengumpulkan, menyusun dan merumuskan hasil *review* akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar;
- b. Inspektorat Kota Denpasar melakukan *review* atas pencapaian kinerja setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ; dan

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini serta melaporkan kepada Walikota Denpasar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2018

Plt. Walikota Denpasar

Gusti Ngurah Jaya Negara

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2018

Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Drs. A.A. Ngurah Rai Iswara, Msi

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2018
TANGGAL 27 MARET 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan Indikator Kinerja Utama *Key Performance Indicators* atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu

peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Denpasar beserta Perangkat Daerah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari indikator capaian kinerja utama sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Pasal 3 antara lain disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, dan pasal 4 (3) disebutkan antara lain Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah Kota Denpasar perlu diformalkan dalam bentuk Peraturan Walikota, dimana Indikator Kinerja Utama ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama, juga untuk menunjukkan target-target yang harus dicapai berdasarkan tolok ukur indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sasaran penyusunan Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai tolok ukur kinerja utama baik itu di Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Sekretariat DPRD Kota Denpasar, Inspektorat Kota Denpasar, Dinas Daerah Kota Denpasar, Badan Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis, dan Rumah Sakita Daerah Kota Denpasar berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD). Penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 melalui kompilasi seluruh kegiatan strategis dari seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu Indikator Kinerja Utama ini memuat Aspek, Fokus, Indikator dan Penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah Kota Denpasar yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil *outcome* sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Kota Denpasar berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar 2017 Nomor 3);

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar mencakup indikator kinerja utama atas sasaran, program dan kegiatan utama Kota Denpasar yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah (Bagian - bagian di lingkungan Sekretariat Daerah), Dinas Dinas, Lembaga Teknis Daerah (Badan dan Kantor) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Indikator Kinerja Utama memuat tolok ukur kinerja atas Aparatur, Program-Program Utama, Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada keluaran (output) maupun hasil (outcome) untuk indikator masing-masing Sekretariat (Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah), serta Lembaga Teknis Daerah (Badan dan Kantor), Dinas-Dinas yang meliputi Perangkat Daerah pada Tabel berikut.:

Tabel 1.1
Perangkat Kota Denpasar

No	Perangkat Daerah
1	2
1	Sekretariat Daerah Kota Denpasar : 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Denpasar 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar 3. Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar 4. Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar 5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar 6. Bagian Umum Setda Kota Denpasar 7. Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar 9. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar 10. Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar
2	Sekretariat DPRD Kota Denpasar
3	Inspektorat Kota Denpasar
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
8	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
11	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

No	Perangkat Daerah
1	2
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
20	Dinas Sosial Kota Denpasar
21	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
23	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
28	Dinas Pertanian Kota Denpasar
29	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
30	Dinas Pariwisata Kota Denpasar
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
32	RSUD Wangaya
33	Camat Denpasar Barat
34	Camat Denpasar Timur
35	Camat Denpasar Selatan
36	Camat Denpasar Utara

D. SISTEMATIKA

Adapun Sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Kota Denpasar menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam manajemen kinerja yang baik. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama *Core Area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.

Beranjak dari kenyataan arah perkembangan masyarakat Kota Denpasar tumbuh menjadi masyarakat kreatif karena digerakkan oleh Visi **"DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN"** karena itu tidak berlebihan bila pada periode 2016-2021 Kota Denpasar dicanangkan menjadi Kota Kreatif. Untuk menguatkan pondasi Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif pada tahun 2016-2021, dibutuhkan strategi kreatif dan inovatif, diantaranya aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggulan secara sistimatis, partisipatif dan berkelanjutan (*sustainable*).

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk menggambarkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu penetapan indikator kinerja utama ditujukan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dibagi menjadi 3 (tiga) Aspek Utama dan 13 (Tiga Belas) Sasaran yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota Denpasar yaitu :

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari 4 fokus utama yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Ketahanan Pangan
3. Kesejahteraan Rakyat
4. Kebudayaan dan Pariwisata

B. Aspek Pelayanan Umum yang terdiri dari 4 fokus utama yaitu:

1. Pendidikan dan Olah Raga
2. Kesehatan
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketertiban

C. Aspek Daya Saing Daerah yang terdiri dari 5 fokus utama yaitu:

1. Perekonomian
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
3. Lingkungan Hidup
4. Iklim Berinvestasi
5. Kreativitas dan Inovasi

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 13 fokus yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Ketola pemerintah yang Baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur.
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha.
8. Lingkungan Hidup dan Pengelola Bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan Inovasi
11. Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan Rakyat.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, disampaikan pada Lampiran II.

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar merupakan media peningkatan kinerja Pemerintah dimana setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengembangan Indikator Kinerja Utama tersebut akan terus diupayakan diantara masing-masing Perangkat Daerah, sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pencapaian kinerja dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja utama akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja dimasing-masing perangkat daerah pelaksana kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam perumusan dan penetapan indikator kinerja utama tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkup perangkat daerah, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.



Plt. Walikota Denpasar

Gusti Ngurah Jaya Negara

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TANGGAL 27 MARET 2018
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DENPASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		PENJELASAN
1	2	3		4		5
1	Menguatkan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1	Menguatnya keberadaan lembaga- lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	Areal lahan pertanian yang dapat dipertahankan akibat alih fungsi lahan
				2	Indeks Tri Hita Karana	Mengambarkan keberhasilan dalam membangun sikap hidup masyarakat yang seimbang antara memuja. Tuhan dengan mengabdikan pada sesama manusia, serta mengembangkan kasih-sayang pada sesama manusia serta mengembangkan kasih saying pada alam lingkungan

		2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinnekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Melihat kinerja dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
		4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran (%)	Menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan
		5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata rata kesempatan hidup atau waktu hidup yang tersisa

		6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Mencerminkan hasil pembangunan bidang pendidikan
		7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki laki dan perempuan dalam mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan
				9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
				10	Katagori Kota Layak Anak	Menggambarkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk

						menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
		8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh (%).	Menggambarkan upaya/penanganan untuk mengurangi kekumuhan kawasan permukiman.
		9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik (%).	Panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan baik.
				13	Titik Genangan (%)	Untuk melihat keberhasilan dalam mengatasi titik genangan.
				14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	Menggambarkan keberhasilan dalam pemenuhan rumah tangga terhadap akses jaringan sanitasi.
				15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	Menggambarkan keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang terlindungi

3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik(<i>good governance</i>)	10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
				17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori).	Menggambarkan Tertib administrasi, tertib pengelolaan aset dan keuangan.
				18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori).	Tingkat akuntabilitas atau tanggungjawab atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	Melihat perkembangan kontribusi sektor Industri pengolahan dalam pembentukan PDRB.
				20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	Melihat perkembangan kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB.
		12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).	Menggambarkan kinerja terhadap penguatan lembaga adat dalam

						peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
		13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).	Menggambarkan kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas usaha kecil.
				23	Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).	Menggambarkan kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas koperasi.
		14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Menggambarkan perkembangan ekonomi daerah yang layak untuk investasi.
		15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Menggambarkan perkembangan sektor pariwisata.
				26	Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik	Menggambarkan tingkat kunjungan ke obyek daya tarik wisata.
				27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	Menggambarkan jumlah uang yang dibelanjakan di daerah.
5	Manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang	16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi (%)	Jumlah sampah yang dihasilkan dikurangi

	Widi Wasa					dengan jumlah sampah yang dibawa ke TPA
				29	Indeks LH	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.



Plt. Walikota Denpasar

I Gusti Ngurah Jaya Negara



**WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

JABATAN : WALIKOTA DENPASAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 10 Januari 2019
WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR
TAHUN 2019**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
1		2		3	4
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	2.351
		2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80,01
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2.07%
4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran	Persen	3,35
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,39
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Indeks	12,7
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Persen	78,50%
		9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Persen	60%
		10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh	Persen	20%
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik	Persen	64,78
		13	Titik Genangan	Persen	30
		14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	Persen	44,90

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
1		2		3	4
		15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	47,84%
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,00
		17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP
		18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	A
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3,5
		20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6,4
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50
		23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	66
14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	2.5
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	605.066
		26	Lama Tinggal Wisatawan		
			- Asing	Hari	3,14
			- Domestik	Hari	3,11
		27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak	Juta rupiah	291.899,08

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
1		2		3	4
			Restoran, Pajak Hiburan		
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi	Persen	26
		29	Indeks LH	Indeks	53,63

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : **Rp. 2.487.294.595.541,49** (Dua Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah koma Empat Puluh Sembilan Sen)



RAJ DHARMAWIJAYA MANTRA

TABEL RINGKASAN LKJIP TAHUN 2019 PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
				TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TUJUAN 1 : Menguatnya jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali									
SASARAN 1 : Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional									
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	2,170	2,351	1,958	83.28	2,289	85.54	1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	96	80,01	95.50	#VALUE!	80.21	119.06	1. Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :					#VALUE!			
SASARAN 2 : Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya									
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :					N/A			
TUJUAN 2 : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur									
SASARAN 3 : Mengentaskan Kemiskinan									
4	Angka Kemiskinan	Persen	2.24	2.07	2.1	98.55	2.00	95.00	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program pembinaan para penyandang cacat dan tuna grahita 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :					98.55			

SASARAN 4 : Mengurangi Pengangguran									
5	Angka Pengangguran	Persen	1.82	3.35	2.22	133.73	3.25	131.69	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pembinaan Jasa Konstruksi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :					133.73			
SASARAN 5 :Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat									
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.27	73.39	74.68	101.76	74.63	100.07	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pengawasan Obat dan Makanan 3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program obat dan perbekalan kesehatan 10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 11. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 12. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 13. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 14. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 15. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 17. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 18. Program Keluarga Berencana 19. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 20. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 21. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 22. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD 23. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 24. Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan 25. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

									26. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani 27. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5 :					101.76			
SASARAN 6 : Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat									
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12.57	12.57	12.96	103.10	12.96	100.00	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 7. Program Pendidikan Menengah
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6 :					103.10			
SASARAN 7 : Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak									
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	96.88	78.50	96.89	123.43	80.00	121.11	1. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 2. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks	58.80	60.00	58.25	97.08	60.00	97.08	3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Utama	120.00	Nindya	120.00	5. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 6. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 7. Program Perlindungan anak 8. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 9. Program Pemberdayaan Perempuan
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7 :					113.50			
SASARAN 8 : Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan									
11	Luas permukiman kumuh	Hektar	40.06	20	23.08	115.39	100	23.08	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program pengelolaan areal pemakaman 4. Program Pengembangan Estetika Kota 5. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 6. Program Perencanaan Tata Ruang

									7. Program Pemanfaatan Ruang
									8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
									9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :					115.39			
SASARAN 9 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur									
12	Jalan Kondisi Baik	Mater	377,165.00	314,885.44	385,188.90	122.75	334,878.68	115.02	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			77.59	64.78	79.52				2. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
									3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
									4. Program Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan
									5. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan
									6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLA
									7. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
13	Titik Genangan	Titik	6	6	4	150.00	4	100.00	1. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
			25.00	30.00	50.00	166.67			2. Program pengendalian banjir
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	84,293	80,502	86,250	107.14	81,044	106.42	1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
			45.29	44.96	46.80	104.09			
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Orang	502,989	427,794	517,691	121.01	474,300	109.15	1. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
			54.05%	47.84%	54.98%	114.92			
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9 :					127.11			
TUJUAN 3 : Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)									
SASARAN 10 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel									
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82.62	82	86.48	105.46	84	102.95	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
									2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00	1. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
									2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
									3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	A	BB	90.01	AA	80.01	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			70.07	80.01	72.02		90.01		2. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
									3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
									4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
									5. Program perencanaan pembangunan daerah
									6. Program perencanaan pembangunan ekonomi
									7. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
									8. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
									9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
									10. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :					98.49			
TUJUAN 4 : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan									
SASARAN 11 : Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan									
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	8.35	3.50	8.34	238.29		140.17	1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
		Milyar Rupiah	3,192	2,288	3,459		2,467		2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
									3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	9.69	6.40	10.03	156.72		132.03	4. Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
		Milyar Rupiah	4,377	3,515	5,283		4,001		5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
									6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
									7. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :					197.50			
SASARAN 12 : Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa									
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	97.14	100.00	85.71	85.71	100.00	85.71	1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
			34	35	30		35		
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :					85.71			

SASARAN 13 : Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

22	Usaha mikro yang meningkatkan kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0.50	0.50	0.50	100.00	750	60.00	1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Jml UM	300	450	450				2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
									3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 4. Program peningkatan produksi hasil peternakan 5. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 6. Program pengembangan budidaya perikanan 7. Program pengembangan perikanan tangkap 8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 9. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	63.00	66.00	66.00	100.00		87.93	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Koperasi	661	692	692		787		
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :					100.00			

SASARAN 14 : Meningkatnya nilai investasi

24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	4,659	5,174	7,617	147.23	5,435	140.13	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Rupiah (Dalam Milyar)	-27.79	2.50	63.49	2539.60			2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :					147.23			

SASARAN 15 : Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya

25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	594,539	605,066	709,536	117.27	667,086	106.36	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
26	Lama Tinggal Wisatawan								2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	- Asing	Hari	3.13	3.14	3.14	100.00	3.16	99.37	3. Program Pengembangan Kemitraan
	- Domestik	Hari	3.10	3.11	3.11	100.00	3.13	99.36	
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak	Rupiah (Dalam Jutaan)	327,251.39	291,899.08	382,841.74	131.16	305,329.39	125.39	
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :					112.11			

TUJUAN 5 : Memperkuatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan / Ida Sang Hyang Widhi Wasa

SASARAN 16 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup									
28	Sampah tereduksi	Persen	22.32	26.00	26.00	100.00	30.00	86.67	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
29	Indeks LH	Indeks	51.22	53.63	55.24	103.00	55.24	100.00	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :					101.50			

**Prestasi Kota Denpasar Tingkat Provinsi dan Nasional, dan
Internasional Tahun 2019**

No.	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan	Tahun
1.	Penghargaan Nasional Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI), karena Denpasar dinilai berhasil menerapkan konsep kota cerdas atau smart city.	KOMPAS	2019
2.	Penghargaan Nasional Denpasar menjadi salah satu dari 10 Kota Tersehat di Dunia.	Travel Supermarket	2019
3.	Penghargaan Nasional Adhitya Karya Mahatva Yodha award kategori Pembina Umum Terbaik Karang Taruna Kabupaten/Kota	Pengurus Karang Taruna Pusat	2019
4.	Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari B menjadi BB	KEMENTERIAN Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB)	2019
5.	Penghargaan Juara Thailand Investor's Day oleh Tiga Sekolah yang meraih medali ini adalah SMPN 3 Denpasar, SMP 10 Denpasar, dan SMP PGRI3 Denpasar	Trade Exhibition Center (BITEK)	2019
6.	Penghargaan Achievement of Waste Management karena Komitmen Pemkot Denpasar dalam mengurangi sampah plastik	Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Kopiku)	2019
7.	Penghargaan Lifetime Achievement HIPMI Denpasar	Hipmi Denpasar	2019
8.	Penghargaan Nasional karena Program Revitalisasi Pasar Rakyat	Presiden RI	2019
9.	Penghargaan Nasional Satya Lencana Karya Bhakti	Kementerian Dalam Negeri RI	2019
10.	Penghargaan Nasional LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Kementerian Dalam Negeri	2019

No.	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan	Tahun
11.	Penghargaan Internaional sebagai Peringkat Ketiga Kota Sehat se-Asia Tenggara	Travel Supermarket	2019
12.	Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Provinsi Bali	Pemerintahan Provinsi	2019
13	Penghargaan Nasional sebagai Posyandu Terbaik Mother Program Edukasi Kesehatan	Kementerian Kesehatan RI	2019
14.	Penghargaan Internasional sebagai Denpasar Commitment dalam mendukung keestarian warisan budaya	OWHC (Organization of World Heritage Cities)	2019
15.	Penghargaan Internasional untuk Ibu Walikota I.A Selly Dharmawijaya Mantra Karena sebagai istri Kepala Daerah turut melestarikan seni dan budaya	UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)	2019
16.	Penghargaan Terbaik Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	2019
17.	Penghargaan Nasional Sebagai Peraih WTP 7 Kali karena telah berhasil menyampaikan laporan disusun dengan standar akutansi pemerintah berbasis akrual	BPK RI	2019
18.	Penghargaan Widya Kusuma Tahun 2019	Biro Kesra Provinsi Bali	2019
19.	Penghargaan Puskesmas Terbaik di Nasional kepada puskesmas II Denpasar Barat (Denbar)	Asosiasi Dinas Seluruh Indonesia (Adinkes)	2019
20.	Penghargaan Nasional sebagai 10 besar Kota Kreatif Indonesia	Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI	2019
21.	Penghargaan Nasional Indonesia Attractiveness Award 2019 Katagori “Pemenang Platinum Kota Besar Pariwisata”	Tempo Media Group	2019

No.	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan	Tahun
22.	Penghargaan Nasional Indonesia Attractiveness Award 2019 Katagori “Pemenang Gold Kota Besar Pelayanan Publik”	Tempo Media Group	2019
23.	Penghargaan Nasional Pakarti Utama I Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) kepada PKK Kota Denpasar karena berhasil mendukung program Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)	Tim Penggerak PKK Pusat	2019
24.	Penghargaan Nasional Satyalancana Pembangunan Karena telah menyelesaikan pembangunan Nasional khususnya dibidang Perkoperasian	Presiden RI	2019
25.	Penghargaan Inovasi TOP 99 “DAMAKESMAS”	KEMENTERIAN Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB)	2019
26.	Penghargaan Nasional Sebagai Kota Layak Anak 2019 Katagori “Utama”	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2019
27.	Penghargaan Nasional Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha karena Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam memaksimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Presiden RI	2019
28.	Penghargaan Predikat LBS Terbaik Tingkat Nasional kepada PKK Kota Denpasar	Tim Penggerak PKK	2019
29.	Penghargaan Nasional Woman of The Year 2019 kepada Ibu Walikota I.A Selly Dharmawijaya Mantra	Yayasan Penghargaan Indonesia	2019
30.	Penghargaan Public Service Of The Year 2019 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota	Markplus.inc	2019

No.	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan	Tahun
31.	Penghargaan kepada Kota Denpasar sebagai Most prosperous City karena berhasil meraih peringkat pertama dengan nilai tertinggi sebagai kota paling makmur di Indonesia	FIABCI-Asia Pasific	2019
32.	Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2019 tingkat Nasional	Menteri Perhubungan Republik Indonesia	2019
33.	Penghargaan Nasional Anugrah Humas Indonesia (AHI) Tahun 2019 kategori Terpopuler di Media Online	PR Indonesia	2019
34.	Penghargaan Internasional Asia Pasific Cities Aliance for Tobacco Control (APCAT) Award tahun 2019 kepada Satpol PP Denpasar	Co-Chir APCAT	2019
35.	Penghargaan Nasional Integrasi Data dan Informasi Pertahanan dan Tata Ruang Dalam Mendukung percepatan serta integrasi Data dan Informasi Pertahanan dan Tata Ruang Kota Denpasar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional	2019
36.	Penghargaan Nasional sebagai Kota Kreatif Indonesia Tahun 2019	Bekraf RI	2019
37.	Penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) 2019	Kementerian Dalam Negeri	2019
38.	Penghargaan kategori “Best City Smart Economy” serangkaian Exhibition, Evaluation and Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019	Kementerian Komunikasi dan informatika RI	2019



Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar
Telp. (0361) 234831 , Fax. (0361) 221534



www.denpasarkota.go.id
email : organisasi_denpasar@yahoo.co.id

